



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2024



BULA, MARET 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya selama tahun 2024. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah,

Sasaran yang diukur dan dievaluasi dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 hanyalah sasaran yang sangat strategis, materil dan urgen yang memberikan kontribusi langsung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024.

Upaya untuk mencapai keberhasilan kinerja tahun 2024 telah dilaksanakan, namun disadari masih ditemui adanya kendala-kendala dan kekurangan sehingga perlu adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dalam hal ini Bupati Seram Bagian Timur dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur serta seluruh aparatur dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menfokuskan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur serta rencana kerja tahunan (RKT), sehingga pada tahun-tahun mendatang akan diperoleh indikator kinerja yang secara realistis dapat mengakomodasikan peningkatan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Seram Bagian Timur. Segala prestasi yang berhasil diraih dapat menjadi motivasi untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai menjadi pelajaran berharga untuk diperbaiki dan bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Bula, Maret 2025

a.n. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. ACHMAD O. AMAHORU, M.Si
Pembina Utama Madya - IV/d
NIP. 19721005 199311 1 001



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Gambaran Singkat Kabupaten Seram Bagian Timur	5
E. Permasalahan	24
F. Isu Strategis	43
G. Sistematisa Penyusunan	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	46
A. Visi dan Misi	46
B. Tujuan dan Sasaran	51
C. Strategi dan Arah Kebijakan	55
D. Indikator Kinerja Utama	59
E. Perjanjian Kinerja	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	71
A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	73
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	73
C. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024	83
D. Permasalahan dan Solusi	128
E. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	128
BAB IV PENUTUP	130
A. Simpulan	130
B. Upaya Lebih Lanjut	131
LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis Tahun 2021-2025	Page 1 of 11
2. Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024	Page 1 of 3



3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	Page 1 of 2
4. Realisasi Program Pendukung Sasaran Tahun 2024	Page 1 of 5



BAB I

• PENDAHULUAN

PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang di implementasikan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Empat hal tersebut merupakan fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan tahapan terakhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “stake holder”, LKIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi pada periode berikutnya.

Sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam lingkup internal birokrasi, fungsi ini diterjemahkan melalui serangkaian tindakan korektif yang konsisten dan kontinyu sebagai upaya perbaikan strategi yang dianggap paling tepat untuk diterapkan saat ini sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target



yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus-menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia, peralatan dan teknologi sangat diperlukan. Manfaatnya, dalam jangka pendek strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dalam jangka menengah, keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program. Sedangkan dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Kabupaten Seram Bagian Timur tetap eksis dan unggul dalam persaingan antar kabupaten/kota di era otonomi daerah.

A. Latar Belakang

Dengan bergulirnya reformasi dalam tata kelola negara di Indonesia pada dekade terakhir dimana masyarakat sebagai stakeholders semakin sadar akan perannya sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap terjaganya keutuhan dan kelangsungan pemerintahan sebagai media untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang telah disepakati dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, menuntut adanya akuntabilitas dalam tata pengelolaan negara oleh seluruh aparatur negara sesuai prinsip Good Governance serta menghindarkan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga terwujud Clean Governance.

untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman



penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) didasarkan pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LKIP tahun 2024 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabuapen Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 20014 tentang pemerintah daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026.

C. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LKIP Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam



menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyusunan LKIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (performance improvement) di masa yang akan datang.

D. Gambaran Singkat Kabupaten Seram Bagian Timur

1. Yuridis

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru.

2. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Seram Bagian Timur dengan merujuk kepada wilayah administrasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, Kabupaten Seram Bagian Timur dibatasi oleh :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah

Luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya 20.656,894 Km² terdiri dari wilayah daratan 5.779,123 Km² dan luas wilayah lautan adalah 14.877,771 Km² yang terbagi atas dua gugus pulau besar yaitu:

1. Gugus Pulau I dengan luas wilayah 15.093,52 Km² terdiri dari luas daratan 3.773,38 Km² dan lautan 11.320,14 Km², terdiri atas empat pulau, yakni :



- Pulau Seram Bagian Timur (Kecamatan Seram Timur, Bula, dan Werinama)
- Pulau Geser
- Pulau Gorom
- Manuwoko

2. Gugus Pulau II dengan luas wilayah 794,4 Km² terdiri dari luas daratan 119,16 Km² dan lautan 675,24 Km² , yaitu Pulau Kesui.

Deretan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Seram Bagian Timur berjumlah 62 pulau diantara sebanyak 27 pulau dihuni sedangkan sisanya sebanyak 35 pulau tidak dihuni.

3. Administratif

Wilayah Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari lima belas Kecamatan dan jumlah desa 198 (seratus sembilan puluh delapan) desa, yaitu :

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa
1	Bula	Bula	10 desa
2	Seram Timur	Geser	16 desa
3	Pulau Gorom	Kataloka	24 desa
4	Werinama	Werinama	10 desa
5	Tutuk Tolu	Air Kasar	11 desa
6	Wakate	Tamher Timur	18 desa
7	Kilmury	Kilmury	13 desa
8	Siwalalat	Atiahu	12 desa
9	Teor	Wermaf Kampung Baru	10 desa
10	Pulau Panjang	Pulau panjang	7 desa
11	Bula Barat	Waiketam Baru	13 desa
12	Gorom Timur	Miran	23 desa
13	Kian Darat	Kian Darat	10 desa
14	Siritaun Wida Timur	Siritaun Wida Timur	10 desa
15	Teluk Waru	Waru	11 desa
Jumlah			198 desa

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2024



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Luas wilayah Daratan dari masing-masing Kecamatan dilingkungan Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	Prosentase (%)
1	Bula	643,36	11,13
2	Bula Barat	880,29	15,23
3	Tutuk Tolu	330,09	5,71
4	Seram Timur	73,35	1,27
5	Kilmury	837,62	14,49
6	Pulau Gorom	91,303	1,58
7	Pulau Panjang	20,53	0,36
8	Gorom Timur	29,29	0,51
9	Wakate	37,58	0,65
10	Teor	23,41	0,41
11	Werinama	993,84	17,20
12	Siwalalat	847,19	14,66
13	Teluk Waru	669,67	11,59
14	Siritaun Wida Timur	172,37	2,98
15	Kian Darat	129,23	2,24
Jumlah		5.779,123	100

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2024

4. Penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan Tahun 2024 seluruhnya berjumlah 140.972 jiwa, terdiri dari :

- Laki – laki	: 71.186	Jiwa
- Perempuan	: 69.786	Jiwa
Jumlah		140.972 Jiwa

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Tingkat penyebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Bula	13.714	13.672	27.386
2	Seram Timur	6.235	6.112	12.347
3	Werinama	2.912	2.884	5.796
4	Pulau Gorom	11.075	10.836	21.911
5	Wakate	4.657	4.509	9.033
6	Tutuk Tolu	3.652	3.485	7.137
7	Siwalalat	3.428	3.364	6.792
8	Kilmury	3.394	3.319	6.713
9	Pulau Panjang	1.318	1.352	2.670
10	Teor	1.663	1.638	3.301
11	Gorom Timur	4.805	4.642	9.357
12	Bula Barat	4.452	4.112	8.564
13	Kian Darat	3.284	3.258	6.540
14	Siritaun Wida Timur	3.581	3.616	7.197
15	Teluk Waru	3.016	2.888	5.904
	Jumlah	71.186	69.786	140.972

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024

5. Pendidikan.

Jumlah murid Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

Kecamatan	Tingkat/Jenjang Pendidikan					
	SD	Ibtidayah	SLTP	MTSn	SLTA	Aliyah
P. Gorom	2.948	630	1.159	255	997	192
Wakate	1.580	216	478	58	366	64
Seram Timur	1.730	55	533	230	560	175



Kecamatan	Tingkat/Jenjang Pendidikan					
	SD	Ibtidayah	SLTP	MTSn	SLTA	Aliyah
Tutuk Tolu	613	485	259	159	222	133
Werinama	781	-	266	59	178	-
Bula	2.674	219	702	586	1.278	222
Kilmury	984	122	264	65	107	-
Siwalalat	873	80	357	-	238	-
Teor	494	-	134	-	79	-
Gorom Timur	1.001	94	385	82	556	-
Bula Barat	967	-	257	120	222	-
Pulau Panjang	393	-	128	-	76	-
Kian Darat	791	207	317	142	194	102
Siritaun Wida Timur	827	207	377	86	322	92
Teluk Waru	958	-	241	-	78	-
Jumlah	17.614	2.315	5.857	1.842	4.215	980

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2024

6. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan masyarakat yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur, berupa 2 unit Rumah Sakit berlokasi di kecamatan Bula, 22 unit Puskesmas dan 62 unit Puskesmas Pembantu yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Tabel Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik/balai kesehatan	Polindes	Posyandu
1	Bula	1	1	3	3	1	18
2	Seram Timur	-	2	5	-	-	25
3	P. Gorom	1	3	6	-	-	39
4	Werinama	-	2	3	-	-	16
5	Tutuk Tolu	-	1	2	-	-	12



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik/balai kesehatan	Polindes	Posyandu
6	Wakate	-	1	8	-	1	21
7	Kilmury	-	2	4	-	2	19
8	Siwalalat	-	2	2	-	1	14
9	Teor	-	1	1	-	1	10
10	Pulau Panjang	-	1	1	-	1	6
11	Bula Barat	-	2	6	-	2	13
12	Gorom Timur	-	1	-	-	-	18
13	Kian Darat	-	1	2	-	-	10
14	Siritaun Wida Timur	-	1	1	-	-	13
15	Teluk Waru	-	1	5	-	-	14
Jumlah		2	22	49	3	9	248

Sumber data : *Data RSUD kab. Seram Bagian Timur

**Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2024

Jumlah tenaga kesehatan sebanyak 1.054 orang, yaitu 29 Tenaga Medis, 499 Tenaga Keperawatan, 307 Tenaga Kebidanan, 34 Tenaga Kefarmasian, dan 185 tenaga lainnya. Baik tenaga medis maupun para medis di Kabupaten Seram Bagian Timur menurut status fungsional dengan pola sebaran pada masing-masing kecamatan sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kecamatan	Dokter			Tenaga				
		Umum	Spesialis	Gigi	Medis	Kesehatan	Bidan	Farmasi	Kesehatan lainnya
1	P. Gorom	5	2	1	3	66	40	5	27
2	Wakate	-	-	-	1	30	15	1	-
3	Seram Timur	-	-	-	4	48	29	1	-
4	Tutuk Tolu	-	-	-	0	26	18	1	-
5	Werinama	-	-	-	3	40	18	3	-



No	Kecamatan	Dokter			Tenaga				
		Umum	Spesialis	Gigi	Medis	Kesehatan	Bidan	Farmasi	Kesehatan lainnya
6	Bula	17	11	1	5	46	31	2	161
7	Kilmury	-	-	-	1	20	14	3	-
8	Siwalalat	-	-	-	2	40	18	2	-
9	Teor	-	-	-	1	15	13	-	-
10	Gorom Timur	-	-	-	2	30	20	2	-
11	Bula Barat	-	-	-	1	66	32	4	-
12	Pulau Panjang	-	-	-	1	15	7	1	-
13	Kian Darat	-	-	-	1	20	14	3	-
14	Siritaun Wida Timur	-	-	-	2	17	15	1	-
15	Teluk Waru	-	-	-	2	20	23	5	-
Jumlah		22	13	2	29	449	307	34	199

Sumber data : *Data RSUD Kab. Seram Bagian Timur

**Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2024

7. Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya seluas 203.041,50 Ha dengan rincian peruntukan dan pengelolaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

- Tanaman Pangan dan Hortikultura seluas 130.994,5 Ha (64,52%), yang baru dikelola seluas 3.032 Ha (0,02%) dengan jenis komoditas padi, palawija, jagung, kacang tanah, sayur dan buah-buahan.
- Perkebunan Seluas 346.931 Ha (6,0 %) yang baru dikelola seluas 39.076 Ha (11,26%) dengan jenis komoditi kelapa, cengkih, pala, coklat dan kopi.
- Peternakan seluas 72.047 Ha (35,48%) yang baru dikelola 20 Ha (0,03 %) dengan jenis komoditi Rumput Hijauan Makan Ternak jenis



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Rumput Gaja, Rumput Lapangan areal ternak sapi, kambing serta unggas.

Berikut jumlah produksi tanaman pertanian dan perkebunan menurut jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah:

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Kecamatan Bula			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	34	40	136
- Ubi Kayu	10	130	130
- Ubi Jalar	3	110	33
- Kacang Tanah	6	14	8
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	15	16	24
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1242	400	479
- Cengkih	33	92	90
- Pala	308	140	6
- Coklat	78	853	33
- Kopi	22	49	1
- Jambu Mete	9	500	4
Kecamatan Seram Timur			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	90	40	360
- Ubi Kayu	23	130	299
- Ubi Jalar	-	-	-
- Kacang Tanah	19	110	209
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	747	237	395
- Cengkih	691	666	309
- Pala	381	230	27
- Coklat	34	90	4
- Kopi	14	123	2
- Jambu Mete	4	255	2



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Kecamatan P. Gorom			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	19	39	74
- Ubi Kayu	22	120	264
- Ubi Jalar	20	100	200
- Kacang Tanah	8	14	11
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.715	180	338
- Cengkih	1.074	1.585	671
- Pala	1.271	980	924
- Coklat	23	441	12
- Kopi	24	320	2
- Jambu Mete	9	275	3
Kecamatan Werinama			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	51	29	199
- Ubi Kayu	19	120	288
- Ubi Jalar	13	110	143
- Kacang Tanah	10	13	13
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.652	1.780	1.721
- Cengkih	1.228	1.593	784
- Pala	1.154	780	155
- Coklat	185	1.360	102
- Kopi	48	410	4
- Jambu Mete	18	975	5
Kecamatan Tutuk Tolu			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Jagung	6	40	24
- Ubi Kayu	11	120	132
- Ubi Jalar	10	100	100
- Kacang Tanah	9	13	12
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	2	15	3
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	969	2.206	276
- Cengkih	1.055	759	598
- Pala	389	331	27
- Coklat	38	440	10
- Kopi	41	200	2
- Jambu Mete	5	190	2
Kecamatan Wakate			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	3	39	12
- Ubi Kayu	6	120	72
- Ubi Jalar	7	110	170
- Kacang Tanah	2	13	3
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.228	1.228	3.309
- Cengkih	507	570	492
- Pala	791	900	422
- Coklat	32	120	10
- Kopi	39	320	2
- Jambu Mete	5	190	2
Kecamatan Kilmury			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	9	39	35
- Ubi Kayu	16	120	192
- Ubi Jalar	14	110	140
- Kacang Tanah	16	13	21
- Kacang Hijau	-	-	-



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	2.015	530	1328
- Cengkih	2.402	1.480	696
- Pala	910	480	15
- Coklat	92	200	10
- Kopi	43	360	3
- Jambu Mete	12	730	7
Kecamatan Siwalalat			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	44	40	176
- Ubi Kayu	20	130	260
- Ubi Jalar	14	110	154
- Kacang Tanah	4	14	8
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.546	2.360	1.907
- Cengkih	998	1.290	501
- Pala	691	420	7
- Coklat	116	1.370	114
- Kopi	29	830	3
- Jambu Mete	12	760	5
Kecamatan Bula Barat			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	1.077	45	4.846
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	50	40	210
- Ubi Kayu	12	130	156
- Ubi Jalar	12	110	132
- Kacang Tanah	15	14	21
- Kacang Hijau	3	47	14
- Kacang Kedele	34	16	518
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.577	380	590
- Cengkih	120	20	324
- Pala	405	240	5



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Coklat	192	1.289	89
- Kopi	37	120	3
- Jambu Mete	16	970	6
Kecamatan Pulau Panjang			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	55	40	220
- Ubi Kayu	10	130	130
- Ubi Jalar	17	110	187
- Kacang Tanah	4	14	6
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:	-	-	-
- Kelapa	1.050	1.200	980
- Cengkih	-	-	-
- Pala	-	-	-
- Coklat	20	3	230
- Kopi	29	310	3
- Jambu Mete	4	120	1
Kecamatan Gorom Timur			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	20	40	80
- Ubi Kayu	13	130	169
- Ubi Jalar	8	110	88
- Kacang Tanah	8	14	11
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	966	294	391
- Cengkih	858	1.475	350
- Pala	467	885	198
- Coklat	20	250	3
- Kopi	19	325	3
- Jambu Mete	8	365	3



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Kecamatan Teor			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	5	39	20
- Ubi Kayu	9	120	108
- Ubi Jalar	10	100	100
- Kacang Tanah	5	13	7
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.305	2.250	1.957
- Cengkih	293	478	183
- Pala	311	758	83
- Coklat	26	140	4
- Kopi	15	325	2
- Jambu Mete	7	300	3
Kecamatan Lian Vitu			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	6	40	24
- Ubi Kayu	8	120	96
- Ubi Jalar	8	100	80
- Kacang Tanah	5	13	7
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	530	165	276
- Cengkih	506	510	235
- Pala	387	312	38
- Coklat	32	80	3
- Kopi	15	210	1
- Jambu Mete	5	350	2
Kecamatan Kian Darat			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	4	39	16



Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Ubi Kayu	11	130	143
- Ubi Jalar	10	110	110
- Kacang Tanah	5	14	7
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	605	188	315
- Cengkih	505	504	233
- Pala	369	348	40
- Coklat	57	120	6
- Kopi	20	186	1
- Jambu Mete	5	220	2
Kecamatan Teluk Waru			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	5	39	19
- Ubi Kayu	3	130	39
- Ubi Jalar	-	-	-
- Kacang Tanah	4	14	6
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.270	390	478
- Cengkih	264	138	134
- Pala	459	100	10
- Coklat	129	717	63
- Kopi	26	61	2
- Jambu Mete	13	700	5
- Kelapa Sawit	200	-	-

Sumber data : Dinas Pertanian tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan produksi tanaman pangan yang memiliki produksi paling besar adalah padi sawah diikuti ubi kayu dan jalar, tanaman perkebunan yang memiliki produksi paling besar adalah pala diikuti cengkih, kelapa, coklat, dan kopi.

Berikut jumlah populasi peternakan menurut jenisnya di Kabupaten



Seram Bagian Timur:

No	Kecamatan	Kuda	Kerbau	Sapi	Kambing	Unggas
1	Bula	3	-	1.720	623	2.994
2	SeramTimur	-	-	7	2.170	1.243
3	P. Gorom	-	-	23	1.718	2.134
4	Werinama	16	-	410	2.478	1.866
5	TutukTolu	-	-	212	612	1.134
6	Wakate	-	-	-	325	1.876
7	Kilmury	-	-	152	975	1.476
8	Siwalalat			610	1.108	1.679
9	Teor	-	-	-	616	978
10	Pulaun Panjang	-	-	-	217	659
11	Bula Barat	-	3	6.123	324	4.751
12	Gorom Timur	-	-	-	782	1.972
13	Kian Darat	-	-	28	523	971
14	Siritaun Wida Timur	-	-	52	315	772
15	Teluk Waru	-	9	380	167	2.231
Jumlah		19	12	9.723	12.953	27.038

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2024

Untuk usaha peternakan adalah ternak potong yang keluar dari Kabupaten Seram Bagian Timur dan umumnya usaha peternakan ini masih bersifat tradisional. Populasi ternak terbesar adalah unggas diikuti kambing dan sapi.

8. Perikanan

Kondisi perairan laut kabupaten Seram Bagian Timur adalah seluas 11.935,84 Km² dan memiliki garis pantai sepanjang 627,58 Km², serta luas wilayah kelola lautnya (0-4 mil laut) adalah 5.947,98 Km² dan luas perairan 4-12 mil adalah 11.189,82 Km², luas kawasan potensi budi daya adalah 82,75 Km².



Jumlah produksi perikanan dan kelautan yang dihasilkan dari berbagai jenis usaha dibidang perikanan yaitu sebesar 20.671,63 ton yang terdiri dari produksi penangkapan sebesar 20.561 ton dan produksi budidaya sebesar 110,63 ton Sedangkan untuk konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah 75 kg/kapita/tahun atau 132,79% dari standar nasional yaitu 56,48 kg/kapita/tahun.

9. Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi pertambangan umum, bahan galian C, air bawah tanah, air permukaan dan minyak bumi.

Berikut data produksi Bahan Galian C di Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2016:

No	Jenis Bahan Galian	Produksi (m ³)
1	Batu Kali	26.571
2	Batu Pecah	23.373
3	Batu Karang	13.708
4	Pasir Pasang	26.382
5	Pasir Urug	2.674
6	Sirtu	68.166
7	Kerikil	4.752
8	Tanah Urug	20.161
Jumlah		186.487

Sumber data : Profil Daerah Seram Bagian Timur 2019

10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 0,04 % dari tahun sebelumnya



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2021-2024:

NO.	LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	883,97	988,50	1.097,09
2.	Pertambangan dan Penggalian	843,46	1.048,75	684,12
3.	Industri Pengolahan	48,30	56,61	59,70
4.	Pengadaan listrik dan Gas	0,49	0,52	0,54
5.	Pengadatan Air, pengelolaan Sampah	1,99	2,13	2,32
6.	Konstruksi	232,20	251,15	270,50
7.	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda Motor	232,31	265,39	297,50
8.	Transportasi dan Pergudangan	85,27	99,92	120,57
9.	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	15,11	16,90	18,78
10.	Informasi dan Komunikasi	19,59	21,59	23,49
11.	Jasa Keuangan	59,66	65,87	66,90
12.	Real Estate	10,63	11,22	11,90
13.	Jasa Perusahaan	4,13	4,54	4,83
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	539,25	583,00	609,61
15.	Jasa Pendidikan	75,25	81,44	85,07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81,29	90,89	101,86
17.	Jasa Lainnya	44,81	49,69	54,50
TOTAL PDRB		3.177,71	3.638,14	3.509,35

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur 2023

Sedangkan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur atas dasar Harga konstan 2010 yang berlaku menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) adalah:



No.	SEKTOR	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	561,14	601,34	643,52
2.	Pertambangan dan Penggalian	507,84	491,11	489,77
3.	Industri Pengolahan	28,08	31,79	32,80
4.	Pengadaan listrik,Gas	0,36	0,37	0,38
5.	Pengadan Air, pengelolaan Sampah	1,68	1,74	1,85
6.	Konstruksi	132,79	138,87	144.43
7.	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda Motor	150,01	162,52	173.75
8.	Transportasi dan Pergudangan	53,97	57,26	63,01
9.	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	9,23	10,01	10,76
10.	Informasi dan Komunikasi	16,20	17,42	18,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	36,91	37,09	37,01
12.	Real Estate	7,56	7,86	8,18
13.	Jasa Perusahaan	3,25	3,46	3,61
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	322,21	341,70	346,13
15.	Jasa Pendidikan	54,13	57,54	60,06
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,62	56,92	61,60
17.	Jasa Lainnya	28,56	30,49	32,13
Total PDRB		1.936,88	2.047,50	2.127,49

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur 2023

11. Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan Tahun 2024 terdiri dari :

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;



d. Dinas, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
6. Dinas Ketahanan Pangan;
7. Dinas Pertanian;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Dinas Pariwisata;
13. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
14. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan;
19. Dinas Perikanan;
20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. Dinas Pemadam Kebakaran.

e. Badan, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;



f. Kecamatan, terdiri atas:

1. Kecamatan Bula;
2. Kecamatan Bula Barat;
3. Kecamatan Tutuk Tolu;
4. Kecamatan Seram Timur;
5. Kecamatan Kilmury;
6. Kecamatan Pulau Gorom;
7. Kecamatan Pulau Panjang;
8. Kecamatan Gorom Timur;
9. Kecamatan Wakate;
10. Kecamatan Teor;
11. Kecamatan Werinama;
12. Kecamatan Siwalalat;
13. Kecamatan Teluk Waru;
14. Kecamatan Siritaun Wida Timur;
15. Kecamatan Kian Darat.

g. Pemerintahan Desa sebanyak 198 desa.

E. Permasalahan

1.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1.1. PENDIDIKAN

Terhadap masalah pendidikan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Kurang optimalnya implementasi kebijakan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkaitan dengan aspek komunikasi dan sumber daya serta aspek pembangunan karakter anak yang belum berjalan dengan baik;



2. Masih terdapat sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum memenuhi standar;
3. Masih terdapat Guru SD maupun SMP yang belum memiliki kompetensi dan sertifikasi, termasuk ratio guru terhadap siswa untuk beberapa sekolah yang berada pada wilayah pulau atau gugus pulau;
4. Masih kurangnya minat pengelola lembaga kursus dan pelatihan termasuk proses pendaftaran akreditasi dan/atau reakreditasi kelembagaan;
5. Penyelesaian pendidikan kesetaraan yang masih perlu ditingkatkan
6. Penguatan Digitalisasi Sekolah
7. Penguatan Assesmen Kopetensi Siswa Indonesia (AKSI) khususnya kompetensi siswa membaca, sains, dan matematika
8. Reformulasi kebijakan DAK Fisik untuk fokus pada percepatan wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih besar kepada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah;
9. Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan;
10. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketrampilan dan keahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas Major Project dan sector prioritas (pariwisata dan kelautan, perikanan dan pertanian) termasuk produk unggulan daerah;



11. Peningkatan program Guru Penggerak; IV-199 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026 SBT Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing
12. Peningkatan Bantuan Sosial Pendidikan;
13. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi peningkatan kualitas sumber daya pendidik (Guru);

1.1.2. KESEHATAN

Terhadap masalah Kesehatan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil. Ibu nifas, bayi, balita dan anak yang perlu terus ditingkatkan sesuai dengan standar;
2. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah yang perlu terus ditingkatkan termasuk perumusan standar penyelenggaraan kesehatan daerah;
3. Jumlah dan sebaran tenaga kesehatan untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di daerah.

1.1.3. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Terhadap masalah Kesehatan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih perlunya pembenahan dan/atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
2. Masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana seperti halnya penyediaan air bersih, sanitasi dan untuk beberapa wilayah yang rentan bencana (banjir, abrasi dan gempa) untuk bangunan yang sesuai dengan standar bencana;
3. Meningkatnya potensi bencana alam dan proses alih fungsi lahan serta pemenuhan standar lingkungan permukiman terutama di kawasan konservasi (mangrove dan sependan sungai/pantai);



4. Perlu adanya pengawasan terhadap kesesuaian peruntukan kawasan sesuai dengan arahan dan pemanfaatan ruang dan kawasan sesuai dengan RTRW;

1.1.4. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Terhadap masalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan;
2. Belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang;
3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog; IV-200 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026 SBT Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing
4. Belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah;
5. Belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh; dan
6. Belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang.
7. Masih belum optimalnya pengaturan terhadap kawasan strategis cepat tumbuh

1.1.5. SOSIAL

Terhadap masalah Sosial, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih perlu peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan social
2. Ketersediaan data dan informasi terkait dengan PMKS



1.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.2.1. TENAGA KERJA

Terhadap masalah Tenaga Kerja, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Ketidakmampuan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan individu.
2. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang sesuai atau perubahan cepat dalam kebutuhan industry.
3. Fluktuasi ekonomi, perubahan teknologi, dan globalisasi menyebabkan ketidakstabilan di pasar kerja, termasuk penutupan perusahaan dan pemotongan pekerjaan
4. Tekanan kerja yang tinggi, ketidakpastian ekonomi, dan kelelahan dapat menyebabkan masalah kesejahteraan mental dan emosional di kalangan pekerja
5. Masih diperlukan fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;

1.2.2. PENANAMAN MODAL

Terhadap masalah Penanaman Modal, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih kurangnya optimalisasi pengolahan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai dorongan atau penunjang investasi daerah;



2. Masih perlunya peningkatan sistim pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional;

1.2.3. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Terhadap masalah Kepemudaan dan Olahraga, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Kurang meratanya sarana dan prasarana olah raga yang tersedia (dan dalam kondisi baik), terutama pada kampung kampung;
2. Perlunya peningkatan olah raga pendidikan dan prestasi serta pencarian bakat olah raga; IV-201 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur 2021-2026 SBT Sejahtera, Mandiri, Dan Berdaya Saing;
3. Perlunya penguatan kapasitas dan sumber daya kepemudaan untuk peningkatan pendidikan karakter dan budaya lokal daerah;
4. Perlunya peningkatan program program pembinaan kepemudaan sesuai dengan karakter kebangsaan dan budaya lokal atau kearifan masyarakat;
5. Perlunya meningkatkan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan dan pemuda dalam program pemberdayaan masyarakat;
6. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi kelompok pemuda;
7. Pelibatan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengawasan partisipatif khususnya dalam pengawasan dana desa.

1.2.4. KEBUDAYAAN

Terhadap masalah Kebudayaan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:



1. Perlunya indentifikasi dan pengembangan kawasan sejarah/ budaya yang ada di daerah;
2. Perlu adanya pengembangan kelompok seni budaya tradisonal daerah;
3. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai nilai kebangsaan;
4. Perlunya penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even even dan/atau festival daerah
5. Perlunya pemenuhan standar pelayanan dalam pengelolaan dan/atau pengembangan kawasan sejarah/budaya sebagai media/sarana edukasi bagi masyarakat, memperkuat jati diri bangsa dan budaya lokal masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Recitalisasi bangun dan/atau kawasan budaya sejaran masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

1.2.5. PERPUSTAKAAN

Terhadap masalah Perpustakaan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat;
2. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal.

1.2.6. KEARSIPAN

Terhadap masalah Kearsipan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:



1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib system tata kearsipan;
2. Implementasi pengelolaan arsip digital.

1.2.7. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Terhadap masalah Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendah minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi;
2. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk produk lokal;
3. Perlunya peningkatan penerapan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan potensi unggulan lokal daerah;
4. Kurangnya penguatan terhadap entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki UKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama.

1.2.8. STATISTIK

1.2.9. Terhadap masalah statistik, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Perlunya penguatan menuju implementasi Satu Data baik terhadap perencanaan maupun hasil pembangunan;
2. Perlunya validasi data dan akurasi data dan penggunaan digital data.

1.2.10. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Terhadap masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:



1. Masih kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan anak dan perempuan;
2. Pemberdayaan perempuan disektor ekonomi belum sepenuhnya optimal;
3. Perlunya peningkatan partisipasi perempuan.

1.2.11. PANGAN

Terhadap masalah pangan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Meskipun produksi pangan telah meningkat, masih ada orang yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. disebabkan oleh akses terbatas terhadap makanan, konflik, kemiskinan, atau kurangnya pemahaman tentang nutrisi yang seimbang.
2. Beberapa wilayah menghadapi tantangan dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi penduduknya. Faktor seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi produksi dan distribusi pangan.
3. Sistem pangan saat ini seringkali tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Praktik pertanian yang merusak lingkungan, seperti penggunaan pestisida dan pemanfaatan air yang tidak efisien, dapat menyebabkan degradasi tanah dan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Meskipun ada cukup makanan yang diproduksi, distribusi yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap pangan. Faktor seperti infrastruktur yang buruk dan ketidakstabilan politik dapat menghambat distribusi makanan secara efektif.



5. Perubahan iklim mempengaruhi produksi pangan dengan berbagai cara, termasuk melalui cuaca ekstrem, perubahan pola hujan, dan peningkatan suhu.

1.2.12. PERTANAHAN

Terhadap masalah pertanahan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan proses pengumpulan dan verifikasi data;
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar papan, patok karena masih belum jelas batas dan kelengkapan administrasi lainnya;
3. Perlunya adanya koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan terkait dengan Hak Ulayat dan Penegasan Batas Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

1.2.13. LINGKUNGAN HIDUP

Terhadap masalah lingkungan hidup, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih diperlukan upaya mengoptimalkan ketersediaan dan/atau fungsi Ruang Terbuka Hijau;
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R (system pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien);
3. Masih memerlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan;



4. Perlu adanya Manajemen Pengelolaan Lingkungan (Upaya Terpadu dalam penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup);

1.2.14. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Terhadap masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih adanya penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal yang tidak sesuai dengan KK/KTP;
2. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
3. Perlunya pengawasan terhadap SOP dalam memproses dokumen administrasi kependudukan pada semua kecamatan;
4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia termasuk dukungan saran dan prasarana dibidang pelayanan yang masih belum optimal.

1.2.15. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Terhadap masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Perlu adanya antisipasi terhadap dampak bonus demografi khususnya bagi kelompok usia produktif dan kelompok usia lanjut;
2. Perlunya peningkatan jumlah Kader KB yang berkualitas;
3. Perlunya penguatan program KB dan Keluarga Sejahtera bagi remaja dan siswa sekolah;
4. Perlunya adanya sosialisasi bagi pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan yang tidak terpenuhi kebutuhan KB.



1.2.16. PERHUBUNGAN

Terhadap masalah perhubungan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Perlu adanya peningkatan layanan di bidang perhubungan khususnya Terminal;
2. Perlu adanya peningkatan fasilitas kelengkapan jalan serta sarana dan prasaranalalu lintas dan angkutan jalan; 15.4. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan angkutan moda transportasi perairan dan/atau pulau;
3. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran bagi peningkatan sarana dan prasarana transportasi perhubungan laut antar pulau dan/atau antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten.

1.2.17. KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Terhadap masalah komunikasi informatika dan persandian, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta jaringan utilitas untuk menjaga sistim informasi perkotaan
2. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Sistim Satu Data dan Satu Peta;
3. Perlunya mengalokasikan anggaran untuk membangun Aplikasi (Industri 4.0) yang dapat menampung data skala kabupaten yang hasil pengelolaanya biasa digunakan untuk berbagai kepentingan (informasi pembangunan daerah, investasi dan penanaman modal).



1.3. URUSAN PILIHAN NON PELAYANAN DASAR

1.3.1. PARIWISATA

Terhadap masalah pariwisata, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Perlunya inovasi untuk memaksimalkan potensi wisata lokal daerah dan mengantisipasi menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan;
2. Perlunya menguatkan dan/atau menggerakkan kembali Desa Wisata dan Desa Budaya;
3. Perlu menggairahkan kembali kegiatan kesenian dan budaya serta keagamaan yang menurun;
4. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata;
5. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif;
6. Belum optimalnya pengembangan rumah rumah kreatif

1.3.2. PERDAGANGAN

Terhadap masalah perdagangan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya;
2. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal;
3. Masih diperlukan penerapan protokol kesehatan sector perdagangan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal;
4. Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM karena kurang promosi dan pemasaran.



1.3.3. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terhadap masalah kelautan dan perikanan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Perlunya perlindungan terhadap kawasan hutan manggrov yang ada dan tidak beralih fungsi;
2. Perlunya penyusunan road map pengembangan potensi perikanan di kefin pulau geser;
3. Perlu perhatian terhadap pengembangan dan pengelolaan wisat pantai dan bahari;
4. Perlunya pembatasan waktu daerah tangkap terutama ikan julung julung yang ada pada wilayah pesisir;
5. Perlu menindak lanjuti kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di perairan kecamatan seram timur;
6. Perlu adanya manejemen terhadap sumber daya perairan;
7. Perlu pengembangan ekowisata di kecamatan seram bagian timur melalui RTRW Perairan terutama terkait dengan zona pengelolaannya (inti penyangga)
8. Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM para tenaga pendamping/penyuluh dan nelayan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk budidaya dan pengelolaan;
9. Pendampingan dan penguatan terhadap budidaya rumput laut serta usaha pengelolaannya
10. Optimalisasi dan peningkatan invesatasi dalam pengelolaan potensi perikanan
11. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan termasuk pengembangan wisata bahari;
12. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan serta belum optimalnya pengelolaan produk unggulan hasil perikanan;
13. Belum maksimalnya peranan kelembagaan perikanan;



14. Belum optimalnya pengembangan perencanaan pembangunan berbasis pulau/kepulauan dan/ atau gugus pulau termasuk dalma menghadapi implementasi Lumbung Ikan Nasional.

1.3.4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Terhadap masalah pemberdayaan masyarakat desa, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masalah penguatan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa;
2. Penataan Desa dan Desa Adat;
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengawasan terhadap dana desa;
4. Penguatan kerjasama dengan APH dan APIP dalam rangka pengawasan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa;
5. Mendorong percepatan dan penyelesaian Hak Hak Masyarakat Hukum Adat melalui konsolidasi pertanahan untuk hak hak ulayat dan petuanan;
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat desa untuk penguatan ketahanan pangan dan produk unggulan desa;
7. Pembentukan Desa Wisata.
8. Penataan pemeritahan desa untuk penyiapan Desa Adat, Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Kreatif, Desa Sadar Hukum, Desa Keluarga Berencana (KB), Desa Literasi, dan Desa Tanggap Bencana
9. Penyelesaian masalah penyelenggaraan pemilihan kepada desa dan perangkat perangkat desa;
10. Optimalisasi pengembangan potensi desa dan produk unggulan desa;
11. Peningkatan Indeks Pembangunan Desa;



12. Penguatan kapasitas aparatur (perangkat) desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

1.3.5. PERTANIAN

Terhadap masalah pertanian, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Perlunya verifikasi data untuk kepentingan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB);
2. Belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (urban farming), peternakan dan perikanan sebagai peningkatan ketahanan pangan;
3. Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura;
5. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.

1.4. PENUNJANG URUSAN FUNGSI MANEJEMEN NON PELAYANAN DASAR 1.

1.4.1. KEBIJAKAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

Terhadap masalah kebijakan, pelayanan publik dan koordinasi perangkat daerah, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih perlunya peningkatan sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian



kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal;

2. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan peta penegasan batas wilayah karena diperlukan koordinasi intensif dan pengecekan lapangan bersama dengan masyarakat;
4. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat;
5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik sesuai standar;
6. Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat.

1.4.2. KEUANGAN

Terhadap masalah keuangan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Defisit Anggaran: Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh kabupaten adalah defisit anggaran, di mana pengeluaran melebihi pendapatan yang diperoleh. Defisit anggaran dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kenaikan pengeluaran untuk layanan publik yang meningkat atau penurunan pendapatan karena faktor ekonomi.
2. Ketergantungan pada Dana Transfer: Kabupaten sering bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi untuk mendukung anggaran mereka. Namun, ketergantungan ini dapat menjadi masalah jika sumber transfer mengalami pemotongan atau tidak stabil dari waktu ke waktu.



3. Pengeluaran Tidak Efisien: Pengeluaran yang tidak efisien atau kurang terencana dengan baik dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana publik. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas, praktik korupsi, atau keputusan pengeluaran yang tidak didasarkan pada prioritas yang jelas.
4. Keterbatasan Pendapatan Lokal: menghadapi keterbatasan dalam menciptakan pendapatan lokal melalui pajak dan retribusi karena keterbatasan dalam basis pajak atau tingkat kepatuhan yang rendah dari warga.
5. Pengelolaan Risiko Keuangan yang Buruk: Kurangnya pemahaman atau pengelolaan risiko keuangan yang buruk dapat meningkatkan kemungkinan kerugian keuangan yang signifikan bagi kabupaten, baik akibat perubahan ekonomi yang tidak terduga maupun faktor-faktor lain seperti bencana alam.

1.4.3. PENGAWASAN

Terhadap masalah pengawasan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
2. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.
4. Perlunya peningkatan pengawasan internal pemerintah daerah (APIP) dalam kerangka pengawasan dana desa dan penyelenggaran pemerintahan desa;
5. Perlunya pengembangan pengawasan partisipatif dengan melibatkan stakeholder pembangunan;
6. Peningkatan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar lembaga penegak hukum



7. Perlunya penguatan kapasitas APIP.
8. Perlunya penyusunan instrument pengawasan dan SOP pengawasan terhadap aparatur pemerintah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

1.4.4. PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Terhadap masalah perencanaan serta penelitian dan pengembangan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu pada beberapa Perangkat Daerah;
2. Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal;
3. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas.
4. Perlunya melakukan reformulasi perencanaan daerah dengan mengacu pada perencanaan daerah berbasis kepulauan;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya dan manajemen perencanaan daerah;
6. Perlu mempersiapkan sumber daya perencanaan menuju implementasi kenijakan Satu Data untuk Pembangunan Daerah;
7. Penguatan dan optimalisasi system perencanaan dan informasi pembangunan daerah.

1.5. PENUNJANG URUSAN UNSUR MANEJEMEN NON PELAYANAN DASAR

1.5.1. SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Terhadap masalah sarana dan prasarana perkantoran, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang dalam kondisi kurang baik;



2. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang kurang sesuai pemenuhannya.

1.5.2. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Terhadap masalah kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Masih belum terbangunnya integrasi sistem informasi kepegawaian dengan instansi pusat.
2. Belum optimalnya penerapan sistem merit dan pengisian jabatan JPT yang masih diisi oleh Pjs;
3. Belum terbangunnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi pegawai;
4. Perlu adanya pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan penyusunan road map reformasi birokrasi.

F. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan jangkar (*anchor*) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (*compass*) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada pencapaian visi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD.

Isu Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing.
2. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektifitas Antar Wilayah.



4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

G. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

▣ **IKHTISAR EKSEKUTIF**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan tingkat pencapaiannya, kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.

▣ **Bab I – PENDAHULUAN**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan LKIP, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan LKIP.

▣ **Bab II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**, menjelaskan secara singkat unsur-unsur RPJMD kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024



▣ **Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA**, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024, termasuk menguraikan secara sistematis tentang keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil serta akuntabilitas keuangan.

▣ **Bab IV – PENUTUP**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

▣ **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1, Rencana Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026

Lampiran 2, Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Lampiran 3, Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Lampiran 4, Realisasi Program Kegiatan Pendukung Sasaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024



BAB II

• PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang di implementasikan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Program dan kegiatan yang yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal.

A. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Melalui pengamatan perkembangan global, karakter Kabupaten Seram Bagian Timur, kultur masyarakat, lingkungan dan sejumlah permasalahan pokok maka dirumuskan suatu cara pandang jauh kedepan kemana Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

Dalam konteks tersebut maka dibangun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai konsekwensi logis dari adanya



komitmen kolektif dari penerapan Otonomi Daerah, maka Visi Pembangunan Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL”**

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya, memiliki makna, bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Tahun 2021-2026, harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikannya perlu dilakukan melalui bekerja keras, kerja cerdas dan kerja bersinergitas baik oleh seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa, bahkan sampai pada struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maupun partisipasi dan dukungan/dorongan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan menetapkan kata “bekerja” sebagai titik fokus target capaian kinerja pemerintahan 5 (lima) tahun mendatang serta didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang bahu menbahu, diharapkan tujuan dan sasaran akhir kinerja dibawah kendali kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur akan tercapai secara optimal.
2. Sejahtera, memiliki makna, bahwa seluruh kehidupan masyarakat yang berdimensikan nilai sosial, budaya, ekonomi, politik dengan



didukung oleh tata kelola pemerintahan daerah, sepenuhnya diarahkan untuk semata-mata pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang sejahtera, sehingga diharapkan akan memiliki kemampuan individu yang terampil dalam rangka mendorong terwujudnya daya saing pemerintahan daerah. dan kemandirian secara sosial ekonomi. Kesejahteraan dimaksud sudah barang tentu memiliki dimensi yang luas dan kompleks dengan indikatornya dapat berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan variable ukurnya adalah pendapatan masyarakat, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dengan pemahaman makna tersebut, maka inti dari kesejahteraan adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Kebutuhan dimaksud tidak semata-mata diukur dengan kebutuhan kebendaan/material semata, tetapi juga kebutuhan yang bersifat non kebendaan, seperti rasa tenang, aman dan tentram walaupun secara material tidak memiliki harta benda yang berlimpah ruah.

3. Kata Mandiri, dalam kosa kata bahasa indonesia dapat mengandung beberapa makna. Pertama, kata mandiri dapat dimaknai sebagai sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Kedua, kata mandiri dapat diartikan kemampuan untuk bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Dengan demikian kata Mandiri dapat artikan, bahwa seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu



(barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Ketiga, kata mandiri dapat juga diterjemahkan sebagai kondisi psikologis dan mentalis seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. Sedangkan makna Keempat, kata mandiri dapat diartikan sebagai suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain. Dari perspektif kosa kata diatas, maka kata Mandiri mengandung makna, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera jasmani dan rohani akan dilaksanakan secara mandiri, baik dalam penggunaan sumber daya manusia dan penggunaan sumber daya alam. Dengan prinsip kemandirian tersebut diharapkan akan memperkuat bangunan fondasi perekonomian masyarakat. Dengan kuatnya fondasi perekonomian masyarakat akan berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, kemandirian pemerintah daerah dalam menentukan sasaran dan target program prioritas, kemandirian pemerintah daerah dalam pengalokasian pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan dan yang terpenting adalah kemandirian pemerintah daerah dalam



pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.

4. Berdaya Saing, memiliki makna, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selain bertujuan untuk mempercepat ketertinggal Kabupaten Seram Bagian Timur dibandingkan kabupaten/kota lainnya se Provinsi Maluku dalam pembangunan daerah, juga dalam upaya untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan nelayan. Dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang percepatan pembangunan daerah, diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah. Meningkatnya daya saing daerah ditandai antara lain oleh meningkatnya pertumbuhan perekonomian makro daerah, meningkatnya arus investasi ke daerah dan terbukanya lapangan kerja baru, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.
5. Berbasis Sumberdaya Lokal, memiliki maknanya, bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diberbagai bidang disamping memerlukan dukungan sumber daya manusia, juga memerlukan dukungan sumber daya alam dalam jumlah yang relatif besar. Kebutuhan akan sumber daya alam yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pembangunan harus bersumber dari sumber daya alam setempat (lokal). Hal ini penting, agar pelaksanaan pembangunan mempunyai efek ganda antara lain yaitu (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; dan (ii) terkendalnya eksploitasi sumber daya alam lokal.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.



Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai misi sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kota, yang dasarnya merupakan tonggak dari rencana strategis yang disusun untuk lima tahun, yang secara eksplisit memuat kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur yang harus dicapai termasuk landasan kerja yang dipedomani.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 tersebut, misi pembangunan Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan Agenda Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Birokrasi;
2. Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mendorong Peningkatan SDM yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif dan Berdaya Saing;
4. Mendorong Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Fiskal Daerah;
5. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Dan Konektifitas Antar Wilayah; dan
6. Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat.

B. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi, diharapkan akan memberikan arah operasional pembangunan kota yang lebih terukur, obyektif, dan terinci. Oleh karena itu, tujuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur ini juga sekaligus menggambarkan tugas dan fungsi pemerintahan untuk lima tahun.

Bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adanya sasaran yang ditetapkan dalam proses pembangunan wilayah diharapkan dapat



menggambarkan hasil-hasil yang lebih terukur dan khusus yang diinginkan sehingga menjadi tolak ukur yang dapat dijadikan landasan penyusunan strategis yang ditetapkan nantinya. Lebih dari itu adanya sasaran yang ditetapkan ini sekaligus juga menjadi pedoman alokasi sumber daya yang ada sehingga menjadi dasar yang kuat untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Berdasarkan misi di atas, maka tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah :

Misi 1 : Menjalankan Agenda Reformasi Dan Tata Kelola Birokrasi	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya Aparatur (ASN) yang berintegritas dan berkarakter.	1) Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional.
b. Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur (ASN)	2) Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik.
	3) Tranpransi, Akuntabel, Partisipatif
c. Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Yang Bersih dari KKN.	4) Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas Pelayana Publik.
Misi 2 : Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat.	
Tujuan	Sasaran
a. Pengembangan Daya Saing Daerah	1) Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif
	2) Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan
	3) Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor
b. Pengembangan Sektor dan Potensi Unggulan Daerah	4) Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan



	5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan
	6) Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat
	7) Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat
Misi 3 : Mendorong Peningkatan Sdm Yang Berbudaya, Religius, Nasionalus, Kompetitif Dan Berdaya Saing	
Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan Karakter Kehidupan Masyarakat Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Masyarakat.	1) Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokaal Masyarakat.
	2) Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan
	3) Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat
b. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	4) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM
	5) Meningkatkan kualtias anak, perempuan dan pemuda
	6) Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualitas
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningktan disiplin dan penegakan protocol kesehatan	7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	8) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan
MISI 4 : Mendorong Peningkatan Investasi Daerah Dan Penguatan Fiskal Daerah	
Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha	1) Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan.
	2) Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja



	3) Memperkuat perencanaan industri daerah
b. Penguatan dan peningkatan pendapatan daerah	4) Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD
c. Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	5) Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum
d. Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan	6) Membangun SDM yang berkualitas, berakhlak, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif
	7) Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia
Misi 5 : Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah	
Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	1) Mewujudkan konektivitas antara wilayah
	2) Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai
	3) Persentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan
	4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar
b. Meningkatkan pelayanan transportasi antar pulau dan/atau kepulauan	5) Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah
	6) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
Misi 6 : Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat.	
Tujuan	Sasaran
a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan	1. Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0



C. Strategi Dan Arah Kebijakan

Faktor terpenting dalam proses mencapai tujuan dan sasaran adalah merumuskan strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan sumber daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target semaksimal mungkin.

strategi pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Dalam kerangka Menjalankan Agenda Reformasi dan Tata Kelola Birokrasi, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
 - a. Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
 - b. Penataan administrasi asset daerah;
 - c. Pembentukan karakter apartur yang professional, jujur, bersih dan melayani, kreatif, inovatif dan berintegritas;
 - d. Peningkatan kinerja aparatur (ASN) dalam proses pelayanan yang sederhana, responsive, adaptif, dan membuka ruang peran serta dan partisipasi publik;
 - e. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan mutu pelayanan dan moral (minsed) aparatur (ASN);
 - f. Peningkatan efektifitas dan efisiensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan partisipatif dan berbasis teknologi infomasi;
 - g. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas aparatur (ASN);
 - h. Penyusunan Grand design dan Road map reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
2. Untuk mendorong penguatan ekonomi daerah dan masyarakat, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
 - a. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dan produktif mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten;
 - b. Peningkatan promosi, pengembangan kerjasama daerah dan invesatasi serta pengembangan produk unggulan daerah;



- c. Pengembangan sentra ekonomi desa dan penguatan kawasan ekonomi perdesaan;
 - d. Penguatan kinerja ekonomi daerah dan kapasitas fiskal (keuangan) daerah secara berkelanjutan;
 - e. Pengembangan usaha dan industri pengolahan berbasis atau berskala rumah tangga;
 - f. Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi;
 - g. Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, diversifikasi pangan local peningkatan industri pangan olahan serta penyediaan lahan pangan berkelanjutan;
 - h. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan perkebunan
 - i. Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan.
3. Dalam kerangka mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berbudaya, religius, nasionalis, kompetitif dan berdaya saing, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
- a. Mendorong kemandirian seni budaya serta adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat;
 - b. Pengembangan seni budaya masyarakat Seram Bagian Timur dan nilai nilai keagamaan;
 - c. Mendorong kemandirian seni budaya serta adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat;
 - d. Pengembangan kawasan sejarah/budaya yang ada di daerah;
 - e. Pengembangan kelompok seni budaya tradisional daerah;
 - f. Penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai nilai kebangsaan;
 - g. Penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even even dan/atau festival daerah.
4. Dalam kerangka mendorong peningkatan investasi daerah dan penguatan fiskal daerah, strategi yang akan dilakukan diantaranya:



- a. Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan ekonomi daerah;
 - c. Penguatan Inovasi daerah;
 - d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
 - e. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
 - f. Pengembangan objek destinasi wisata, promosi pariwisata berbasis teknologi informasi, penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif.
5. Dalam rangka meningkatkan pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
- a. Revitalisasi model perencanaan dan pembangunan daerah berbasis gugus kepulauan;
 - b. Implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gugus pulau secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai sektor unggulan daerah;
 - c. Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana wilayah;
 - d. Meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap infrastruktur dasar; dan
 - e. Meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur.
6. Dalam kerangka mendorong peningkatan layanan sosial dasar masyarakat, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
- a. Peningkatan akses dan layanan pendidikan yang berkualitas dan kesejahteraan serta kualitas Guru;
 - b. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;



- c. Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketrampilan dan keahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas Major Project dan sector prioritas (pariwisata dan kelautan, perikanan dan pertanian) termasuk produk unggulan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya

Agar kebijakan dapat menjadi pedoman bagi seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka kebijakan yang dipilih juga dirumuskan tidak hanya baik dari konsep atau teori namun diupayakan dapat diimplementasikan.

Pada tahapan kedua periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, arah kebijakan Tahun 2024 meliputi :

1. Penyiapan pelaksanaan program unggulan daerah;
2. Evaluasi akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintahan;
3. Optimalisasi pengelolaan SDA dan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan;
4. Peningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis teknologi informasi;
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
6. Meningkatkan proporsi belanja langsung untuk mendorong kualitas pelayanan publik;



7. Mengintegrasikan pengelolaan pertanian dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam kerangka pengelolaan lahan pangan berkelanjutan serta penguatan ketahanan pangan; dan
8. Melakukan penataan terhadap tata ruang diperdesaan untuk mendukung aktifitas ekonomi perdesaan.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007, Pasal 4 Ayat (3), mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan kerja pemerintah daerah masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut dan merujuk pada RPJMD 2021-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan IKU dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Indiktaor Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Misi 1 : Menjalankan Agenda Reformasi Dan Tata Kelola Birokrasi				
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			2024	Akhir Tahun RPJMD
1) Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Mindset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional.	1) Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	B	A
		Angka	2,51 - 3,25	3,26 – 4,00
2) Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik.	1) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	A
		Angka	2,51 - 3,25	3,26 – 4,00
		Nilai	B	A



3) Tranpransi, Akuntabel, Partisipatif	1) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	2,51 - 3,25	3,26 – 4,00
4) Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas Pelayanan Publik.	1) IPK dan IRB	Nilai	B	A
		Angka	2,51 - 3,25	3,26 – 4,00

Misi 2 : Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			2024	Akhir Tahun RPJMD
1) Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	1) Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	5,71	6,01
2) Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	33,20	35,70
3) Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	1) Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	67,50	80,00
4) Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan	1) Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	100	100
5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	1) Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	-
6) Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	1) Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,18	-
7) Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan	1) Wirausahaan	Persen	10,1	-



kesejahteraan masyarakat				
Misi 3 : Mendorong Peningkatan Sdm Yang Berbudaya, Religius, Nasionalus, Kompetitif Dan Berdaya Saing				
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			2024	Akhir Tahun RPJMD
1) Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokaal Masyarakat.	1) Indeks Pembagunan Kebudayaan	Persen	75,8	90,2
2) Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan	1) Indeks Pembagunan Kebudayaan	Persen	75,8	90,2
3) Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat	1) Indeks Pembagunan Kebudayaan	Persen	75,8	90,2
4) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	1) Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi
5) Meningkatkan kualtias anak, perempuan dan pemuda	1) Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi
6) Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualitas	1) Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi
7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1) Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8	90,0



8) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan	1) Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8	90,0
MISI 4 : Mendorong Peningkatan Investasi Daerah Dan Penguatan Fiskal Daerah				
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			2024	Akhir Tahun RPJMD
1) Meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	77,0 - 81,0	77,5 - 81,5
2) Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	1) Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,26	51,5
3) Memperkuat perencanaan industri daerah	1) Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	2,30 - 156,64
4) Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	1) Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	2,30 - 156,64
5) Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	1) Indeks Demokrasi (ID)	Angka	100	100
	2) Indeks Rasa Aman (IRA)	-	-	-
6) Membangun SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	1) Tenaga kerja terampil dan sertifikasi	Persen	55,1	60,0
7) Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	1) Wirausahaan	Persen	10,5	11,0
	2) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	55,3	55,7



	3) Indeks Inovasi Daerah (IID)	Skor Indeks	100	150
Misi 5 : Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Dan Konektifitas Antar Wilayah				
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			2024	Akhir Tahun RPJMD
1) Mewujudkan konektifitas antara wilayah	1) Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	39,4
2) Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai	1) Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	39,4
3) Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan	1) Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	39,4
4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar	1) Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	39,4
5) Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah	1) Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1	60,0
		Skor	Tinggi	Tinggi
6) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	1) Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1	60,0
		Skor	Tinggi	Tinggi
Misi 6 : Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat.				
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			2024	Akhir Tahun RPJMD
		Persen	5,02	6,50



1. Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	1. IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB		71,2	75,0
			56,4	60,0
			94,2	95,0
			3,7	5,00
			25	35,00
			7,3	8,00
			65	75,00

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang akan diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional	- Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	B
			Angka	2,51 - 3,25
2	Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B
			Angka	2,51 - 3,25
3	Transparansi, Akuntabel, Partisipatif	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B
			Angka	2,51 - 3,25



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas Pelayanan Publik	- IPK dan IRB	Angka	2,51 - 3,25
5	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	5,71
6	Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	33,20
7	Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	67,50
8	Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	100,00
9	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86
10	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,18
11	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	- Wirausahaan	Persen	10,1
12	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Masyarakat	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8
13	Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
14	Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8
15	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi
16	Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi
17	Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualitas	- Indeks Pembangunan Manusia	Persen	Tinggi
18	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8
19	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8
20	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	77,0 - 81,0
21	Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,26
22	Menguatkan perencanaan industri daerah	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86
23	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86
24	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	- Indeks Demokrasi (ID)	Angka	100
		- Indeks Rasa Aman (IRA)	-	-
25	Membangun SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	55,1



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
26	Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Wirausahaan	Persen	10,5
		- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	55,3
		- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Skor Indeks	100
27	Mewujudkan konektifitas antara wilayah	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7
28	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7
29	Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7
30	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7
31	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah	- Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1
32	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	- Tingkat Aksesibilitas	Skor	Tinggi
33	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	- IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB	Persen	5,02
				71,2
				56,4
				94,2
				3,7
				25
				7,3
				65



Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan di atas adalah Program, yaitu kumpulan dari kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program yang terkait dengan pencapaian target Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026.

✚ Urusan Pendidikan :

- a. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

✚ Urusan Kesehatan :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program peningkatan disiplin dan penegakan kesehatan Covid-19;
- c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

✚ Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Penyelenggaraan Jalan;
- b. Program Pengembangan Pemukiman;
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

✚ Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
- b. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;



- c. Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- d. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM.)
- ✚ Urusan Penanaman Modal:
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Program Promosi Penanaman Modal;
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e. Program Pengelolaan Data dan System Informasi Penanaman Modal.
- ✚ Urusan Kebudayaan:
 - a. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
 - b. Program Pengembangan Kebudayaan;
 - c. Program Pembinaan Sejarah;
 - d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- ✚ Sekretariat Daerah:
 - a. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Program Administrasi Umum.
- ✚ Urusan Kelautan dan Perikanan:
 - a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - b. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

F. RENCANA ANGGARAN TAHUNAN 2024

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan total belanja



langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 879.365.241.079,- dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 223.328.681.752,-

Anggaran belanja langsung merupakan bagian dari APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, sebagaimana komposisi belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	Persen (%)
1.	Belanja Operasi	742.184.679.867	84,40
2.	Belanja Modal	135.680.561.212	15,43
3.	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000	0,17
	Jumlah	879.365.241.079	100

Keterkaitan antara sasaran yang hendak dicapai berdasarkan indikator keberhasilan dari sasaran dengan pelaksanaan dari masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2024, dapat dilihat didalam Rencana Kinerja Tahun 2024 pada Lampiran 1 dan Lampiran (RKT).



BAB III

• AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, merupakan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Badan Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur dalam bentuk data, fakta, informasi dan keterangan menyangkut kinerja pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2024. Adanya pertanggungjawaban ini diharapkan akan menggambarkan keberhasilan dan kelemahan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024, sekaligus alat evaluasi dalam sistem pengendalian Pemerintah dan pembangunan yang efisien dan efektif.

Sebagai bentuk paradigma baru akuntabilitas kinerja, maka pengukuran kinerja, (keberhasilan/kelemahan) sektoral pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tidak hanya ditekankan kepada kemampuan untuk menyerap sumber daya (khususnya anggaran yang disediakan), lebih luas mencakup kemampuan untuk mencapai *output* dan *outcome* sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian selain mengetahui kinerja sektoral pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024, pengukuran kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memberikan umpan balik (*feedback*) dalam upaya meningkatkan secara terus menerus keberhasilan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada masa akan datang.

A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 menggunakan dua pendekatan untuk menghitung persentase pencapaian target, pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :



$$\text{Rumus I :} \quad \frac{\text{Persentase Pencapaian target}}{\text{target}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rumus II :} \quad \frac{\text{Persentase Pencapaian target}}{\text{target}} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Laporan akuntabilitas ini menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO.	JUMLAH NILAI	KATEGORI	WARNA
1	≥ 80	Sangat Baik	Yellow
2	60 s/d kurang dari 79,9	Baik	Green
3	50 s/d kurang dari 59,9	Cukup baik	Blue
4	1 s/d kurang dari 49,9	Kurang Baik	Orange
5	0	Data tidak lengkap	Grey

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2024, adalah sebagai berikut:



NO	KATEGORI	SASARAN	PERSENTASE
1.	Sangat baik	14	42%
2.	Baik	7	21%
3.	Cukup Baik	1	3%
4.	Kurang Baik	3	9%
5.	Data tidak lengkap	8	24%
Jumlah		33	100%

Dengan demikian secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam tahun 2024 berhasil. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja lebih lanjut disajikan dalam sub bab berikut ini.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Target dan Relisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

Dalam melakukan analisis capaian kinerja digunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan Analisis dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Oleh karena Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, maka analisis atas pencapaian sasaran-sasaran disajikan sesuai dengan urusan yang dilaksanakan tersebut, adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Mindset Apartur	- Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	B	-	
			Angka	2,51 - 3,25	-	-



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Birokrasi (ASN) yang profesional					
2	Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik.	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	-	-
			Angka	2,51 - 3,25	-	-
3	Transparansi, Akuntabel, Partisipatif	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	-	-
			Angka	2,51 - 3,25	-	-
4	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas Pelayanan Publik	- IPK dan IRB	Nilai	B	-	-
			Angka	2,51 - 3,25	-	-
5	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	5,71	33,25	582%
6	Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	33,20	82,52	249%
7	Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	67,5	28,04	42%
8	Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	100	77,24	77%



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	peningkatan ketahanan pangan					
9	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	- Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	3,91 - 167,2	170% 106%
10	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,18	-	-
11	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	- Wirausahaan	Persen	10,1	20,97	207%
12	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Masyarakat.	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8	59,38	78%
13	Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8	59,38	78%
14	Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8	59,38	78%



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
15	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi	Tinggi
16	Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi	Tinggi
17	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	65,05	70,24	108%
18	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8	49,12	65%
19	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8	49,12	65%
20	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	77,0 - 81,0	82,52	103%
21	Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,26	-	-
22	Menguatkan perencanaan industri daerah	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	3,91 - 167,2	170% 106%
23	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	3,91 - 167,2	170% 106%



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
24	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	- Indeks Demokrasi (ID)	Angka	100	-	-
		- Indeks Rasa Aman (IRA)	-	-	-	-
25	Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	54,5	28,04	51%
26	Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Wirausahaan	Persen	10,5	20,97	200%
		- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	55,3	-	-
		- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Skor Indeks	100	33,23	33%
27	Mewujudkan konektifitas antara wilayah	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	66,67	172%
28	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	66,67	172%
29	Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	66,67	172%
30	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	66,67	172%
31	Peningkatan Pelayanan	- Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1	5,91	11%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah		Skor	Tinggi	kurang	
32	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	- Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1	5,91	11%
			Skor	Tinggi	kurang	
33	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	- IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB	Persen	5,02	-	
				71,2	-	
				56,4	-	
				94,2	-	
				3,7	-	
				25	-	
				7,3	-	
				65	-	



b. Perbandingan Capaian Kinerja

1. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Terhadap Target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian 2024 terhadap RPJMD
1	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	-	A	-
		Angka	-	3,26 – 4,00	-
2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	-	A	-
		Angka	-	3,26 – 4,00	-
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	-	A	-
		Angka	-	3,26 – 4,00	-
4	IPK dan IRB	Nilai	-	A	-
		Angka	-	3,26 – 4,00	-
5	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	33,25	150	22,16
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	82,52	35,7	231
7	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	28,04	80,0	35
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	77,24	100	77,24
9	Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio	Persen	3,91-167,2	2,30156,64	170107
10	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	-	51,5	-
11	Wirausahaan	Persen	20,97	11,0	191
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	59,38	90,2	65,83
13	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	-	51,5	-



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian 2024 terhadap RPJMD
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	59,38	90,2	65,83
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	59,38	90,2	65,83
16	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi	tinggi
17	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi	tinggi
18	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	70,24	90	78,04
19	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	49,12	90,0	54,58
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	82,52	77,5 – 81,5	104
21	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	-	51,5	-
22	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	3,91 - 167,2	2,30 - 156,64	170 107
23	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	3,91 - 167,2	2,30 - 156,64	170 107
24	Indeks Demokrasi (ID)	Angka	-	100	-
25	Indeks Rasa Aman (IRA)	-	-	-	-
26	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	28,04	60,0	47
27	Wirausahaan	Persen	20,97	11,0	191
28	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	-	55,7	-
29	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Skor	33,25	150	22,16
30	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	66,67	39,4	169
31	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	66,67	39,4	169
32	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	66,67	39,4	169



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian 2024 terhadap RPJMD
33	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	66,67	39,4	100
34	Tingkat Aksesibilitas	Persen	5,91	60,0	9,85
		Skor	rendah	tinggi	rendah
35	Tingkat Aksesibilitas	Persen	5,91	60,0	9,85
		Skor	rendah	tinggi	rendah
36	IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB.	Persen	-	6,50	
			-	75,0	
			-	60,0	
			-	95,0	
			-	5,00	
			-	35,00	
			-	8,00	
			-	75,00	

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	-	-	-
		Angka	-	-	-
2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	-	-	-
		Angka	-	-	-
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	-	-	-
		Angka	-	-	-
4	IPK dan IRB	Nilai	-	-	-
		Angka	-	-	-
5	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	-	36,42	33,25



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	-	-	82,52
7	Tenaga kerja terampil dan sertifikasi	Persen	-	-	28,04
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	72	70,30	77,24
9	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,61	4,10	3,91 - 167,2
10	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	86,57	52,77	-
11	Wirausahaan	Persen	8	12,63	20,97
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	9	10	59,38
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	8	10	59,38
14	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	10	10	59,38
15	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Sedang	Sedang	Tinggi
16	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Sedang	Sedang	Tinggi
17	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	64,30	65,05	70,24
18	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	40,71	51,25	49,12
19	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	40,71	51,25	49,12
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	-	-	82,52
21	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	86,57	52,77	-
22	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,61	4,10	3,91 - 167,2
23	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,61	4,10	3,91 - 167,2
24	Indeks Demokrasi (ID)	Angka	-	-	-
25	Indeks Rasa Aman (IRA)	-	-	-	-
26	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	-	-	28,04



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024
27	Wirausahaan	Persen	8	12,63	20,97
28	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	-	-	-
29	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Skor Indeks	-	36,42	33,25
30	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	66,67	66,67	66,67
31	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	66,67	66,67	66,67
32	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	66,67	66,67	66,67
33	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	66,67	66,67	66,67
34	Tingkat Aksesibilitas	Persen	5,91	5,91	5,91
		Skor	rendah	rendah	rendah
35	Tingkat Aksesibilitas	Persen	5,91	5,91	5,91
		Skor	rendah	rendah	rendah
36	IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB	Persen	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan Analisis dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja



sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja, untuk setiap indikator kinerja sasaran dilakukan analisis/penjelasan capaian kinerja disesuaikan dengan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka analisis atas pencapaian sasaran-sasaran disajikan sesuai dengan urusan yang dilaksanakan tersebut, adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Menjalankan Agenda Reformasi Dan Tata Kelola Birokrasi

Misi ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, dan diukur melalui 4 (empat) indikator.

1) Sasaran Strategis 1. Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Mindset Apartur Birokrasi (ASN) yang professional, mendapat kategori data tidak lengkap. Hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu : Indeks Persepsi Korupsi

1. Indeks Presepsi Korupsi (IPK)

Indeks IPK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance.

Jumlah nilai persepsi korupsi rata-rata per indikator menunjukkan penilaian masyarakat terhadap indikator unsur korupsi dalam pelayanan SKP tersebut. Unsur-unsur pelayanan SKP berada pada jumlah rata-rata kisaran interval 3,26 – 4,00 atau mutu pelayanan A (BERSIH DARI KORUPSI) dan jumlah nilai rata-rata kisaran interval 2,51 – 3,25 atau mutu pelayanan B (CUKUP BERSIH DARI KORUPSI) sehingga apabila dirata-



ratakan mutu pelayanan per indikator pelayanan umumnya dikategorikan BERSIH DARI KORUPSI.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui KPK telah melakukan pemantauan pada 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. yakni area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Kabupaten Seram Bagian Timur menempati urutan ke-7 se-Provinsi Maluku dan secara Nasional menempati urutan ke 476 dalam peringkat penilaian MCP KPK dengan nilai MCP sebesar 48,64%.

Tujuan *Monitoring Center Prevention* (MCP) terkait data dukung dalam capaian aksi pencegahan korupsi di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Progres Capaian MCP KPK RI Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022-2024

NO	AREA INTERVENSI	% BOBOT	% CAPAIAN/TAHUN		
			2022	2023	2024
1	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	15	53,35	56.375	87% dan 16%
2	PENGADAAN BARANG DAN JASA	15	33,43	46.674	23
3	PERIZINAN	14	61,56	76.6	77
4	PENGAWASAN APIP	14	41,09	24.225	22
5	MANAJEMEN ASN	14	26,1	54.974	56
6	OPTIMALISASI PAJAK DAERAH	14	71,29	91.088	51
7	PENGELOLAAN BMD	14	43,31	50.92	56
8	TATA KELOLA KEUANGAN DESA	100	35,3	45.97	



2) Sasaran Strategis 2. Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik, mendapat kategori data tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu : Indeks Reformasi Birokrasi

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Pemerintah Daerah pada tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian terhadap pelayanan publik terhadap 7 unit pelayanan publik. Secara keseluruhan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Kabupaten Seram Bagian Timur mendapatkan Nilai Akhir dan Zona 75,88 kategori C atau Kualitas Sedang dengan rincian penilaian sebagai berikut:



HASIL PENILAIAN						
No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Sosial	11.48	10.17	19.39	9.85	50.90
2	Puskesmas Banggoi	16.89	11.39	19.39	15.58	63.25
3	Dinas Pendidikan	16.05	21.30	19.39	21.54	78.28
4	Dinas Kesehatan	16.80	28.76	19.39	15.41	80.36
5	Puskesmas Bula	17.67	30.82	19.39	16.44	84.33
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.83	28.24	19.39	21.54	87.00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.81	30.31	19.39	21.54	87.05
Nilai Akhir dan Zona		75.88				
Kategori		C				
Opini		Kualitas Sedang				



3) Sasaran Strategis 3. Tranparansi, Akuntabel, Partisipatif, mendapat kategori data tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi.

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Pelayanan publik yang baik harus mendasarkan pada tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sedangkan partisipatif berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik.

Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan reformasi terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:



manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

- 4) Sasaran Strategis 4.** Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas Pelayanan Publik, mendapat kategori data tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu: Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Reformasi Birokrasi.

1. Indeks Presepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Peran sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur. Upaya pemberantasan korupsi di sebuah negara mesti terus dipantau perkembangannya, untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. Setidaknya ada tiga indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yang digunakan sebagai alat pengukuran di Indonesia, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Ketiga indikator tersebut menunjukkan tingkat korupsi di sebuah daerah atau negara yang laporannya dirilis setiap tahun. Dari perbandingan dari tahun ke tahun dari indikator tersebut, kita jadi bisa tahu apakah ada peningkatan atau penurunan tindak pidana korupsi. Selain itu, kita juga bisa tahu perubahan perilaku masyarakat dalam menanggapi korupsi.



Penanaman budaya integritas dan nilai antikorupsi mulai dari lingkup keluarga sedari dini. Peningkatan penyebaran informasi antikorupsi juga perlu dilakukan secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah, ormas, bahkan pada kalangan Pendidikan sejak usia dini.

MISI 2 : Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, dan diukur melalui 4 (empat) indikator.

1) Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Iklim Investasi, Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif, mendapat kategori sangat baik. Hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya sebesar 100%, yaitu: Indeks Inovasi daerah

1. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Kategori Rentang Skor Sangat Inovatif 60,01 - 100,00, Inovatif 35,00 – 60,00, Kurang Inovatif 0,01 - 34,99, Tidak Dapat Dinilai 0, Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan quality control akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2024 mendapatkan kategori kurang inovatif dengan capaian angka 33,25%. Pemerintah Daerah akan terus berupaya mengejar ketertinggalan dalam bidang inovasi dengan menargetkan pencapaian 70% pada *Inovation Government Award (IGA)*.

Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

- 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan



fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, ekepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;

- 2) Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan
- 3) Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

Jenis inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

- 1) Inovasi Digital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;
- 2) Inovasi Nondigital Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Indikator Sistem Inovasi daerah sebagai berikut:

1. Regulasi Inovasi Daerah
2. Ketersediaan SDM terhadap inovasi
3. Dukungan indikator
4. Penggunaan IT



5. Bimtek Inovasi

- 2) Sasaran Strategis 2.** Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan, mendapat kategori sangat baik. Hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 249%, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat nilai Indeks Kualitas Lingkungan sebesar 82,52. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO_3 , dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO_2 dan NO_2 ; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Pada tahun 2023, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Indikator untuk menghitung IKLH



kapaten/kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH provinsi dan nasional. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH didasarkan pada indeks sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas Udara
- Indeks Kualitas Lahan
- Indeks Kualitas Air Laut

Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, bagi Pemerintah Daerah akan melaksanakan masa sanggah terhadap hasil data IKLH yang telah disampaikan. Nantinya ketetapan nilai IKLH akan disampaikan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 3) Sasaran Strategis 3.** Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor, mendapat kategori data tidak lengkap. Berdasarkan hasil



pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu: Tenaga kerja terampil dan sertifikasi

1. Tenaga kerja terampil dan sertifikasi

Penyediaan dan penyelenggara tenaga kerja terampil dan sertifikasi yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan lahir tenaga kerja bersertifikat yang berkualitas khususnya dalam pekerjaan spesialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 42%, yaitu: Tenaga kerja trampil dan sertifikasi.

4) Sasaran Strategis 4. Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan, mendapat kategori baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 77,24%, yaitu: Skor Pola Pangan Harapan

1. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan serta mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur, diperlukan persediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya.

Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2024 memiliki tingkat konsumsi pangan masyarakat cukup beragam ditandai dengan Angka Kecukupan Energi (AKG) mencapai 97,45% dan Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 77,24 Poin.

Permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Aspek ketersediaan pangan
2. Aspek keterjangkauan pangan
3. Aspek konsumsi pangan
4. Dukungan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan.



Pemerintah Daerah berupaya melakukan tindak lanjut untuk dapat keluar dari permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan optimalisasi/pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL
2. Menghimbau kepada Kepala Nidang, KPA, PPTK dan seluruh staf yang memegang kegiatan agar memasukkan laporan kegiatan tepat setelah selesai melaksanakan kegiatan kepada kepala bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan

5) Sasaran Strategis 5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 100%, yaitu: Pertumbuhan PDRB

1. Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio

Produk Domestik Regional Bruto/PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tercatat sebesar 3.509,35 miliar rupiah. PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 2.127,49 miliar rupiah atau mengalami kontraksi 3,91 % dari tahun sebelumnya.

Indeks Implisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu. Indeks Implisit Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 sebesar 177,69

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori



ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

- 6) Sasaran Strategis 6.** Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, mendapat kategori data tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu: Indeks Kinerja Investasi Daerah

1. Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)

IKID menunjukkan bagaimana suatu daerah menarik masuknya investasi yang dihitung relatif terhadap besar kecilnya perekonomian, yaitu rasio pangsa PMDN yang masuk ke suatu perekonomian terhadap dunia terhadap pangsa PDRB terhadap total. IPID menunjukkan faktor-faktor yang diharapkan mempengaruhi daya tarik suatu daerah dalam menarik investor. Kedua indeks ini diharapkan mampu memberikan gambaran awal pada investor daerah-daerah mana yang mempunyai indeks kinerja investasi yang mengindikasikan potensi investasi yang menguntungkan. Berdasarkan kedua indeks ini akan ditentukan indeks daya saing daerah di Indonesia. Pada tahap awal akan ditentukan indeks daya saing untuk provinsi di Indonesia dan pada tahap selanjutnya akan ditentukan indeks untuk kabupaten/kota di Indonesia.

Investor adalah orang-perorangan atau lembaga baik domestic atau non domestic yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka Panjang. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan



Modal (LKPM) Yang Dibuat dan Disampaikan Oleh Para Pelaku Usaha. Target nilai investasi di tahun 2023, sebesar 40 Milyar; sedangkan capaian nilai investasi sebesar 20.947.581.686; Capaian ini tidak mencapai target dan tergolong dalam kategori kurang. Pada tahun 2022, capaian nilai investasi sebesar 21.106.485.232; bila dibanding dengan tahun 2023 maka ada penurunan nilai investasi sebesar 0,75%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target investasi, yaitu Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Timur, hal ini disebabkan karena data peluang investasi masih belum terkini, investasi promosi peluang investasi masih rendah dan belum maksimalnya pendataan besaran jumlah penanaman modal secara riil kepada pelaku usaha. Untuk itu ada beberapa hal yang harus tetap dilakukan terkait dengan investasi yaitu:

1. Perlu adanya kegiatan promosi penanaman modal.
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

7) Sasaran Strategis 7. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 207%, yaitu: Wirausahaan

1. Wirausahaan

Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapat Nomor Induk



Berusaha (NIB). Tahun 2024 pertumbuhan wirausahaan di Kabupaten Seram bagian Timur sebesar 20,97%.

Bila dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang terdaftar sampai tahun 2023 sebesar 1.328 wirausaha, tercatat usaha mikro yang menjadi wirausaha baru sebesar 100 wirausaha. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro tahun 2024 sebesar 20,29%.

Jumlah keseluruhan wirausaha yang ada sebesar pada Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 3.810 wirausaha.

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Untuk meningkatkan jiwa pertumbuhan wirausaha perlu dilakukan kajian mengenai pengaruh keberadaan toko modern dan pusat perbelanjaan terhadap toko dan pasar tradisional serta pendampingan intensif untuk diversifikasi dan inovasi produk serta meningkatkan dukungan melalui promosi pada event-event pameran berskala lokal maupun nasional. Sosialisasi terhadap masyarakat, pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang telah terbentuk juga diintensifkan agar pelaku usaha bisa memiliki jiwa kemandirian usaha yang mampu meningkatkan pendapatan dan usaha yang diminati bisa dikembangkan mulai manajemen pemasaran, keuangan maupun komunikasi bisnisnya dan sebagainya, sehingga diharapkan bisa memberikan kemampuan keterampilan untuk menambah penghasilan, produktif bagi peningkatan pembangunan ekonomi.

MISI 3 : Mendorong Peningkatan SDM Yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif Dan Berdaya Saing

Misi ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, dan diukur melalui 4 (empat) indikator.



- 1) Sasaran Strategis 1.** Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Masyarakat, mendapat kategori kurang baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 78,33%, yaitu : Indeks Pembangunan Kebudayaan

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan (IPK) adalah instrument untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki 8 dimensi, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi Budaya (1 indikator) Bidang kebudayaan
2. Dimensi Pendidikan (6 Indikator) pada Bidang Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8 Indikator) Bidang kesbangpol
4. Dimensi Warisan Budaya (6 Indikator) Bidang kebudayaan
5. Dimensi Ekspresi Budaya (4 Indikator) Bidang kebudayaan
6. Dimensi Budaya Literasi (3 Indikator) Bidang arsip dan perpustakaan
7. Dimensi Gender (3 Indikator) Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dimensi Tata Kelola Budaya (Belum dapat Diukur).

Peran penting Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan terus dilakukan dengan membangun sektor kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Menjaga situs budaya peninggalan dan mempromosikan keberagaman budaya dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan dan mengembangkan kegiatan ekonomi budaya, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata dapat membantu ekonomi masyarakat lokal.

- 2) Sasaran Strategis 2.** Pengembangan Seni Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan, mendapat kategori



kurang baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 78,33%, yaitu : Indeks Pembangunan Kebudayaan

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pemerintah Daerah telah mengembangkan program pada bidang kebudayaan untuk meningkatkan literasi kebudayaan dan ketrampilan budaya masyarakat, menyediakan anggaran untuk pembangunan kebudayaan untuk memperbaiki sarana dan prasarana kebudayaan.

3) Sasaran Strategis 3. Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat, mendapat kategori kurang baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 78,33%, yaitu : Indeks Pembangunan Kebudayaan

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pelaksanaan pagelaran seni budaya dan festival adat sering dilakukan dan menjadi ciri khas budaya daerah. Pagelaran seni budaya dan festival adat memberikan beberapa manfaat:

- Melestarikan dan memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luar
- Menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.
- Menjadi ajang untuk mempromosikan produk kerajinan khas daerah kepada wisatawan

4) Sasaran Strategis 4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 100%, yaitu : Indeks Pembangunan Manusia.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan:

- IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,



kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

- IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Kriteria Indeks Pembangunan Manusia 0.800–1.000 (sangat tinggi), 0.700–0.799 (tinggi), 0.600–0.699 (sedang), dan <0.599 (kurang)

Manfaat IPM antara lain:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
- IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
- IPM Kab. Seram Bagian Timur dapat digambarkan Selama periode 2020-2024, IPM Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu yang tercermin adanya peningkatan komponen IPM. Secara konkrit, indikator harapan hidup, harapan dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita sebagai komponen dasar IPM semuanya mengalami peningkatan.

5) Sasaran Strategis 5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 100%, yaitu : Indeks



Pembangunan Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan:

- IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Kriteria Indeks Pembangunan Manusia 0.800–1.000 (sangat tinggi), 0.700–0.799 (tinggi), 0.550–0.699 (sedang).

Manfaat IPM antara lain:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
- IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kab. Seram Bagian Timur dapat digambarkan Selama periode 2020-2024, IPM Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu yang tercermin adanya peningkatan komponen IPM. Secara konkrit, indikator harapan hidup, harapan dan rata-rata lama sekolah, dan



pengeluaran riil per kapita sebagai komponen dasar IPM semuanya mengalami peningkatan.

6) Sasaran Strategis 6. Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualitas, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 100%, yaitu : Indeks Pembangunan Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan:

- IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Kriteria Indeks Pembangunan Manusia 0.800–1.000 (sangat tinggi), 0.700–0.799 (tinggi), 0.550–0.699 (sedang).

Manfaat IPM antara lain:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
- IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selama periode 2020-2024, IPM Kabupaten Seram Bagian Timur



menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu yang tercermin adanya peningkatan komponen IPM. Secara konkrit, indikator harapan hidup, harapan dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita sebagai komponen dasar IPM semuanya mengalami peningkatan.

7) Sasaran Strategis 7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendapat kategori baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 65%, yaitu : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah indikator kunci untuk melihat pembangunan kesehatan sampai tingkat kabupaten/kota. Indikator dalam IPKM 2024 menggunakan data Dinas Kesehatan dan RSUD Bula 2024, Terdapat tujuh (12) indikator sub indeks dalam IPKM 2024 yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan Kesehatan balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada anak usia Pendidikan dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
7. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan diabetes melitus;
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa;
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB;
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan terinfeksi HIV.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengawasi dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan



kesehatan selama lima tahun, di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hasil evaluasi tersebut diharapkan bermanfaat untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan besaran masalah di Kabupaten/Kota.

Sejak tahun 2024 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) telah dicapai oleh Dinas Kesehatan yang menggambarkan kemajuan kesehatan. IPKM merupakan penjabaran lebih lanjut dari komponen kesehatan pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPKM berbasis data pelayanan kesehatan 2024 merupakan indeks komposit dari 30 indikator kesehatan utama disertai pembobotan sesuai perannya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- 8) Sasaran Strategis 8.** Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan, mendapat kategori baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 65%, yaitu : Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah indikator kunci untuk melihat pembangunan kesehatan sampai tingkat kabupaten/kota. Indikator dalam IPKM 2024 menggunakan data Dinas Kesehatan dan RSUD Bula 2024.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengawasi dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan selama lima tahun, di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hasil evaluasi tersebut diharapkan bermanfaat untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan besaran masalah di Kabupaten/Kota.



MISI 4 : Mendorong Peningkatan Investasi Daerah Dan Penguatan Fiskal Daerah

Misi ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, dan diukur melalui 4 (empat) indikator.

1) Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan, mendapat kategori baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 103%, yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat nilai Indeks Kualitas Lingkungan sebesar 82,52. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

2) Sasaran Strategis 2. Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja, mendapat kategori data tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu: Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)

1. Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)

Investor adalah orang-perorangan atau lembaga baik domestic atau non domestic yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka Panjang. Kegiatan usaha



atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Modal (LKPM) Yang Dibuat dan Disampaikan Oleh Para Pelaku Usaha. Target nilai investasi di tahun 2023, sebesar 40 Milyar; sedangkan capaian nilai investasi sebesar 21.106.485.232; Capaian ini tidak mencapai target dan tergolong dalam kategori kurang. Pada tahun 2021, capaian nilai investasi sebesar 34.627.465.000; bila dibanding dengan tahun 2023 maka ada penurunan nilai investasi sebesar 39%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target investasi, yaitu data peluang investasi masih belum terkini, intensitas promosi peluang investasi masih rendah dan belum maksimalnya pendapatan besaran jumlah modal secara riil kepada pelaku usaha. Untuk itu ada beberapa hal yang harus tetap dilakukan terkait dengan investasi yaitu :

1. Perlu adanya kegiatan promosi penanaman modal.
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

3) Sasaran Strategis 3. Memperkuat perencanaan industri daerah, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya sebesar 222%, yaitu: Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio.



1. Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio

Produk Domestik Regional Bruto/PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tercatat sebesar 3.509,35 miliar rupiah. PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 2.127,49 miliar rupiah atau mengalami kontraksi 3,91 % dari tahun sebelumnya.

Indeks Implisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu. Indeks Implisit Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 sebesar 177,69

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

- 4) Sasaran Strategis 4.** Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya sebesar 203%, yaitu: Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio.

1. Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio

Produk Domestik Regional Bruto/PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tercatat sebesar 3.509,35 miliar rupiah. PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 2.127,49 miliar rupiah atau mengalami kontraksi 3,91 % dari tahun sebelumnya.



Indeks Implisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu. Indeks Implisit Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 sebesar 177,69

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

5) Sasaran Strategis 5. Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum, mendapat kategori data belum lengkap. Berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu: Indeks Demokrasi dan Indeks Rasa Aman.

1. Indeks Demokrasi (ID)

Metode baru dalam penghitungan ID tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi, dan sosial. ID metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator.

Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di daerah. Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap daerah di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat



diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

IDI yang di ukur tahun 2021, di ukur dengan 22 indikator yang meliputi aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga dan merawat demokrasi. Perbaikan di berbagai aspek juga dilakukan. Untuk bisa mencapai semua itu, katanya, pemerintah bersama elemen-elemen strategis demokrasi serta masyarakat perlu bahu-membahu mengupayakannya.

Kenaikan Indeks Demokrasi diharapkan juga disumbang oleh kebijakan meluaskan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus terkait ekspresi di ruang publik, termasuk yang menggunakan platform media sosial.

Jika ini dilakukan oleh jajaran penegak hukum, termasuk Polri, saya yakin akan mampu menaikkan angka indeks tersebut lebih tinggi lagi

Salah satu sebab yang membuat indeks demokrasi Indonesia belum tinggi karena penanganan kasus-kasus ekspresi, terutama terhadap orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, terkesan berlebihan. Namun, itu terjadi sebelum introduksi prinsip keadilan restoratif digulirkan. Jika keadilan restoratif ini diterapkan dalam kasus-kasus itu, diyakini akan menjadi poin yang meningkatkan indeks demokrasi.

2. Indeks Rasa Aman (IRA)

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan



keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Selain itu, dengan survei indeks rasa aman diharapkan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan setiap komponen. Nilai Persepsi Rasa Aman di Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan berpredikat “AMAN”. Kabupaten Seram Bagian Timur telah dipersepsikan oleh sebagian besar penduduknya bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur telah bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan rasa aman masyarakatnya, sehingga perlu untuk terus menerus mempertahankan dan meningkatkan predikat “AMAN” tersebut dengan mensinergikan potensi yang ada. Keamanan dan Kenyamanan dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu: dimensi keamanan dari bencana, dimensi kesejahteraan sosial, dimensi perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, dan dimensi keamanan dari kekerasan.

- 6) Sasaran Strategis 6.** Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif, mendapat kategori data tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu: Tenaga kerja terampil dan sertifikasi

1. Tenaga kerja terampil dan sertifikasi

Penyediaan dan penyelenggara tenaga kerja terampil dan sertifikasi yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan lahir tenaga kerja bersertifikat yang berkualitas khususnya dalam pekerjaan spesialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



7) Sasaran Strategis 7. Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia, mendapat kategori cukup baik. Berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator, yang rata-rata capaiannya 66,63%, yaitu : Wirausahaan, Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Inovasi Daerah.

1. Wirausahaan

Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatka Nomor Induk Berusaha (NIB). Tahun 2024 pertumbuhan wirausahaan di Kabupaten Seram bagian Timur sebesar 20,97%.

Jumlah usaha mikro yang terdaftar sampai tahun 2023 sebesar 1.328 wirausaha, sementara pada tahun 2023 yang tercatat usaha mikro menjadi wirausaha baru sebesar 100 wirausaha. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro tahun 2023 sebesar 93,5%.

Jumlah keseluruhan wirausaha yang ada sebesar pada Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 3.810 wirausaha.

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Untuk meningkatkan jiwa pertumbuhan wirausaha perlu dilakukan kajian mengenai pengaruh keberadaan toko modern dan pusat perbelanjaan terhadap toko dan pasar tradisional serta pendampingan intensif untuk diversifikasi dan inovasi produk serta meningkatkan dukungan melalui promosi pada event-event pameran berskala lokal maupun nasional. Sosialisasi terhadap masyarakat, pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang telah terbentuk juga diintensifkan agar pelaku usaha bisa memiliki jiwa kemandirian usaha yang mampu meningkatkan pendapatan dan usaha yang diminati bisa dikembangkan mulai manajemen pemasaran, keuangan maupun



komunikasi bisnisnya dan sebagainya, sehingga diharapkan bisa memberikan kemampuan keterampilan untuk menambah penghasilan, produktif bagi peningkatan pembangunan ekonomi

2. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pemerintah harus mendorong para pemuda untuk mengembangkan daerah melalui program kegiatan yang mampu menarik perhatian pemuda.

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga saat ini telah memiliki program Sentra Pemberdayaan Pemuda Desa/Kelurahan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manfaat dari Program Sentra Pemberdayaan Pemuda Desa/Kelurahan untuk mengukur potensi penduduk usia muda yang masuk ke pasar kerja.

3. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Kategori Rentang Skor Sangat Inovatif 60,01 - 100,00, Inovatif 35,00 – 60,00, Kurang Inovatif 0,01 - 34,99, Tidak Dapat Dinilai 0, Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan quality control akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2024 mendapatkan kategori kurang inovatif dengan capaian angka 33,25%. Pemerintah Daerah akan terus berupaya mengejar ketertinggalan dalam bidang inovasi dengan menargetkan pencapaian 70% pada *Inovation Government Award (IGA)*.

Indikator Sistem Inovasi daerah sebagai berikut:



1. Regulasi Inovasi Daerah
2. Ketersediaan SDM terhadap inovasi
3. Dukungan indikator
4. Penggunaan IT

Bimtek Inovasi

Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

- 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, ekepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
- 2) Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan

Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

MISI 5 : Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Dan Konektifitas Antar Wilayah

Misi ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, dan diukur melalui 4



(empat) indikator.

1) Sasaran Strategis 1. Mewujudkan konektifitas antara wilayah, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 168,78%, yaitu : Indeks Konektifitas Daerah.

1. Indeks Konektivitas Daerah (IKD)

Indeks konektivitas berarti daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada.

Indeks konektivitas merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. untuk menentukan indeks konektivitas maka dengan membandingkan antara jumlah jaringan jalan dan jumlah kota. Indeks Konektivitas Daerah pada wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan kota-kota Kecamatan yang telah tersedia sarana jalan yang baik. Pada wilayah daratan, terdapat ibukota kabupaten dan 8 kota kecamatan. Dengan 5 simpul jaringan jalan yang baik telah terhubung 6 kecamatan. Sementara 3 kota kecamatan belum terhubung dengan sarana jalan yang baik. Dan terdapat 6 kota kecamatan yang berada pada kepulauan dalam wilayah kabupaten yang tidak dapat terhubung dengan sarana jalan, melainkan dengan menggunakan sarana transportasi laut.

2) Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil



pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 168,78%, yaitu : Indeks Konektifitas Daerah.

2. Indeks Konektifitas Daerah (IKD)

Indeks konektivitas berarti daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada.

Indeks konektivitas merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. untuk menentukan indeks konektivitas maka dengan membandingkan antara jumlah jaringan jalan dan jumlah kota. Indeks Konektivitas Daerah pada wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan kota-kota Kecamatan yang telah tersedia sarana jalan yang baik. Pada wilayah daratan, terdapat ibukota kabupaten dan 8 kota kecamatan. Dengan 5 simpul jaringan jalan yang baik telah terhubung 6 kecamatan. Sementara 3 kota kecamatan belum terhubung dengan sarana jalan yang baik. Dan terdapat 6 kota kecamatan yang berada pada kepulauan dalam wilayah kabupaten yang tidak dapat terhubung dengan sarana jalan, melainkan dengan menggunakan sarana transportasi laut.

- 3) Sasaran Strategis 3.** Mempresentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 168,78%, yaitu : Indeks Konektifitas Daerah.

1. Indeks Konektifitas Daerah (IKD)

Indeks konektivitas berarti daerah atau wilayah yang



dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada.

Indeks konektivitas merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. untuk menentukan indeks konektivitas maka dengan membandingkan antara jumlah jaringan jalan dan jumlah kota. Indeks Konektivitas Daerah pada wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan kota-kota Kecamatan yang telah tersedia sarana jalan yang baik. Pada wilayah daratan, terdapat ibukota kabupaten dan 8 kota kecamatan. Dengan 5 simpul jaringan jalan yang baik telah terhubung 6 kecamatan. Sementara 3 kota kecamatan belum terhubung dengan sarana jalan yang baik. Dan terdapat 6 kota kecamatan yang berada pada kepulauan dalam wilayah kabupaten yang tidak dapat terhubung dengan sarana jalan, melainkan dengan menggunakan sarana transportasi laut.

- 4) Sasaran Strategis 4.** Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar, mendapat kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 168,78%, yaitu : Indeks Konektifitas Daerah.

1. Indeks Konektifitas Daerah (IKD)

Indeks konektivitas berarti daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan memiliki pola untuk mengetahui interaksi suatu wilayah. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan



interaksi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada.

Indeks konektivitas merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. Untuk menentukan indeks konektivitas maka dengan membandingkan antara jumlah jaringan jalan dan jumlah kota. Indeks Konektivitas Daerah pada wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan kota-kota Kecamatan yang telah tersedia sarana jalan yang baik. Pada wilayah daratan, terdapat ibukota kabupaten dan 8 kota kecamatan. Dengan 5 simpul jaringan jalan yang baik telah terhubung 6 kecamatan. Sementara 3 kota kecamatan belum terhubung dengan sarana jalan yang baik. Dan terdapat 6 kota kecamatan yang berada pada kepulauan dalam wilayah kabupaten yang tidak dapat terhubung dengan sarana jalan, melainkan dengan menggunakan sarana transportasi laut.

5) Sasaran Strategis 5. Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, mendapat kategori kurang baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 10,84%, yaitu : Tingkat Aksesibilitas.

1. Tingkat Aksesibilitas

Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan konsumen untuk mencapai suatu lokasi. Untuk menilai tingkat aksesibilitas di antaranya yaitu dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi prasarana jalan. Tingkat visibilitas yaitu tingkat kemudahan suatu lokasi untuk dilihat dan dimasuki.

Aksesibilitas merupakan suatu konsep yang menggabungkan sistem tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Dengan kata lain



aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi yang menjadi ukuran adalah jarak tempuh, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas prasarana yang tersedia. Nilai indeks aksesibilitas dihitung dengan rumus (Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan sesuai dengan KEPMEN Kimpraswil No 534/KPTS/M/2001). Indeks Aksesibilitas = Panjang jalan (km)/(Luas wilayah (km²), Sedangkan Besaran parameter kinerja SPM untuk indeks aksesibilitas terbagi atas tingkat pelayanannya yang didasarkan pada kepadatan penduduk (jiwa/km²). Luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya 20.656,894 Km² terdiri dari wilayah daratan 5.779,123 Km² dan luas wilayah lautan adalah 14.877,771 Km².

- 6) Sasaran Strategis 6.** Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, mendapat kategori kurang baik. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya 10,84%, yaitu : Tingkat Aksesibilitas.

1. Tingkat Aksesibilitas

Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan konsumen untuk mencapai suatu lokasi. Untuk menilai tingkat aksesibilitas di antaranya yaitu dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi prasarana jalan. Tingkat visibilitas yaitu tingkat kemudahan suatu lokasi untuk dilihat dan dimasuki.

Aksesibilitas merupakan suatu konsep yang menggabungkan sistem tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Dengan kata lain aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi yang menjadi ukuran adalah jarak tempuh, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas prasarana yang tersedia. Nilai indeks aksesibilitas dihitung dengan rumus (Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan sesuai dengan KEPMEN Kimpraswil No 534/KPTS/M/2001). Indeks Aksesibilitas =



Panjang jalan (km)/(Luas wilayah (km²) Sedangkan Besaran parameter kinerja SPM untuk indeks aksesibilitas terbagi atas tingkat pelayanannya yang didasarkan pada kepadatan penduduk (jiwa/km²).

Tabel Besaran Parameter Kinerja SPM untuk Indeks Aksesibilitas

Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		Nilai Indeks Aksesibilitas
Kategori	Besaran	
Sangat Tinggi	> 5.000	> 5,00
Tinggi	> 1.000	> 1,50
Sedang	> 500	> 0,50
Rendah	> 100	> 0,15
Sangat Rendah	> 100	> 0,05

(Sumber: Kepmenkimpraswil No.534/KPTS/M/2001)

Luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya 20.656,894 Km² terdiri dari wilayah daratan 5.779,123 Km² dan luas wilayah lautan adalah 14.877,771 Km².

MISI 6 : Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat

Misi ini terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, dan diukur melalui 1 (satu) indikator.

1) Sasaran Strategis 1. Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0, mendapat kategori data tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator, yang capaiannya belum terukur, yaitu : IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB.

1. IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB



Pemerintah Daerah dalam pelayanan IPKM mencapai 49,12% pada tahun 2024, bila dibanding dengan tahun 2023 yang mencapai angka IPKM 69,5 terjadi Penurunan sebesar 10,54%. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan



Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) (MGDs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Millennium Development Goals (MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, Deklarasi Pembangunan Millenium berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup. Delapan sasaran MDGs adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Revolusi Industri 4.0 atau sering disebut juga sebagai *cyber physical system* adalah fase dimana komputerisasi semakin diperkuat dengan kemunculan internet dan integrasi berbagai sistem.

Aktivitas *controlling* dan *monitoring* juga dapat dilakukan secara otomatis dan *remote* dari jarak jauh sekalipun. Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu:



1. *Internet of Things* (IoT) merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan (interrelated connection)
2. *Big Data*, adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik
3. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi chatbot dan pengenalan wajah (face recognition) merupakan salah satu contoh penerapan AI.
4. *Cloud Computing*, Komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, dimana pengguna komputer diberikan hak akses (*login*) menggunakan *cloud* untuk dapat mengkonfigurasi peladen (server) melalui internet. Contohnya, *hosting* situs web berbentuk peladen virtual.
5. *Additive Manufacturing*, merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan



memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional.

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4.028.360.675	4.028.360.675	100%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	927.880.827	927.880.827	100%
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	8.043.417.848	1.963.930.001	24%
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	351.118.545	337.729.861	96%
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	150.000.000	67.000.000	45%
6	Program Pengolahan Persampahan	1.150.000.000	460.000.000	40%
7	Program Penempatan Tenaga kerja	50.012.980	50.012.980	100%
8	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.235.099.100	1.234.585.400	100%
9	Program Penanganan Kerawanan Pangan	200.000.000	199.994.000	100%
10	Program Pengawasan Keamanan Pangan	121.250.800	121.250.800	100%
11	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000	30.000.000	100%



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1.779.450.700	1.769.448.000	99%
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.630.000	16.611.488	100%
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	374.100.000	371.311.395	99%
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	983.737.301	966.084.500	98%
16	Program Promosi Penanaman Modal	50.500.000	50.500.000	100%
17	Program Pelayanan Penanaman Modal	257.750.000	257.000.000	100%
18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	84.181.500	84.076.000	100%
19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	935.569.160	929.844.000	99%
20	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	2.349.988.100	2.341.586.200	100%
21	Program Penataan Desa	450.000.000	450.000.000	100,00%
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1.779.450.700	1.769.448.000	99,44%
23	Program Pengembangan Kebudayaan	1.281.092.500	1.205.510.250	94%
24	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	150.000.000	79%
25	Program Pengelolaan Pendidikan	598.684.340	564.644.090	94%
26	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.596.749.617	69.596.749.617	100%



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
27	Pmenian Upaya Kesehatan Perorongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	66.911.293.265	66.911.293.265	100%
28	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	320.000.000	320.000.000	100%
29	Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makan Minum	273.524.960	273.524.960	100%
30	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	150.000.000	67.000.000	45%
31	Program Pengolahan Persampahan	1.150.000.000	460.000.000	40%
32	Program Promosi Penanaman Modal	50.500.000	50.500.000	100%
33	Program Pelayanan Penanaman Modal	257.750.000	257.000.000	100%
34	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	84.181.500	84.076.000	100%
35	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	935.569.160	929.844.000	99%
36	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000	30.000.000	100%
37	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1.779.450.700	1.769.448.000	99%
38	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.630.000	16.611.488	100%
39	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	374.100.000	371.311.395	99%
40	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	983.737.301	966.084.500	98%
41	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.865.586.715	6.531.727.448	95,14%



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.131.116.225	3.109.031.895	99%
43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	880.695.800	876.903.500	100%
44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	516.840.998	2.427.656.917	470%
45	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	623.711.900	1.374.732.050	220%
46	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000	30.000.000	100%
47	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1.779.450.700	1.769.448.000	99%
48	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.630.000	16.611.488	100%
49	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	374.100.000	371.311.395	99%
50	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	983.737.301	966.084.500	98%
51	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	350.000.000	350.000.000	100%
52	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	34.483.160.176	34.483.160.176	100%
53	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.470.000.000	1.470.000.000	100%
54	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	349.900.000	349.900.000	100%



LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
55	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	649.900.000	649.900.000	100%
56	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	170.379.400	170.379.400	100%
57	Program Penempatan Tenaga kerja	50.012.980	50.012.980	100%
58	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1.779.450.700	1.769.448.000	99%
59	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	190.000.000	150.000.000	79%
60	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	8.043.417.848	1.963.930.001	24%
61	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	351.118.545	337.729.861	96%
62	Program Penyelenggaraan Jalan	73.063.148.348	57.547.286.056	79%
63	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.381.131.816	7.025.222.440	84%
64	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.196.072.840	14.196.072.840	100%
65	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	313.393.550	97.420.050	31%
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.179.558.350	7.255.726.150	89%
67	Program Pengembangan Permukiman	5.147.198.180	4.605.465.000	89%
68	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan	99.995.400	99.995.400	100%
69	Program Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	419.145.000	417.772.360	99,67%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
70	Program Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota Dalam Rangka Penurunan Angka Kecelakaan Di Jalan	230.000.000	229.937.640	99,97%
71	Program penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5.549.456.761	5.242.306.761	94,47%
72	Program Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.817.620.205	1.784.139.718	98,16%

D. Permasalahan Dan Solusi

Indikator kinerja yang diukur dari 33 (tiga puluh tiga) indikator yang ada, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang capaiannya belum terukur, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat program yang telah dilakukan masih menunggu hasil penilaian. Program yang telah disusun pemerintah untuk melaksanakan terobosan tidak seluruhnya dapat diimplementasikan namun disesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang ada.

Sebagai solusi untuk hal ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi/pusat untuk mensinergikan program/kegiatan yang ada di OPD masing-masing, sehingga sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai.

E. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp 925.739.601.400,86 atau



91,82% dari rencana pendapatan yang telah ditetapkan dengan rincian capaian pendapatan berdasarkan jenis penerimaan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp. 14.208.070.527,86 meliputi realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 6.105.291.087,08 atau 96,59%; realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 975.144.000,00 atau 76,99%; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.786.600.370,00 atau 100%; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 2.341.035.070,78 atau 6,93% dari target yang telah ditetapkan.
2. Pendapatan Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp. 906.071.021.723 atau 95,38% dari rencana yang ditetapkan yang terdiri dari :
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat direalisasikan sebesar Rp. 892.342.930.268,00 atau 95,55% dan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.728.091.455,00 atau 85,51% dari rencana yang ditetapkan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 5.460.509.150,00 atau 45,31% dari target yang telah ditetapkan, Capaian komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian:
 - Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) direalisasikan sebesar Rp. 5.460.509.150,00 atau 45,31% dan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.728.091.455,00 atau 85,51% dari rencana yang ditetapkan.
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 29.999.363.000,00 atau 45,31% dari rencana yang ditetapkan.



BAB IV

• PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang berkaitan dengan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pencapaian sasaran dalam tahun 2024 adalah 33 sasaran dengan 14 sasaran "sangat baik", 7 sasaran "baik", 1 sasaran "cukup baik", 3 sasaran "kurang baik", dan 8 sasaran data tidak lengkap sehingga secara umum dapat disimpulkan sebagian besar pencapaian sasaran Sangat Baik.
2. Dari sasaran stratejik yang dicapai pada Tahun 2024, dalam pola capaiannya masih dirasakan adanya kekurangan dan beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran dimasa mendatang, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi kondisi nyata yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur, diantaranya capaian sasaran stratejik dalam Tahun 2024 masih berpengaruh oleh adanya perubahan penataan kelembagaan baru, dimana hal tersebut membutuhkan perhatian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Tahun 2024 memerlukan penguatan-penguatan yang berkaitan dengan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Capaian kinerja program dari seluruh kelompok sasaran stratejik yang tercapai dalam Tahun 2024 merupakan program-program utama dan dominan dari seluruh aktivitas penyelenggaraan



pemerintahan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

Terhadap kekurangan-kekurangan dalam penetapan indikator kinerja selama Tahun 2024, akan terus diupayakan perbaikannya dan pengembangannya sehingga diperoleh indikator kinerja yang secara realistis dapat mengakomodasikan peningkatan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Faktor utama dari belum mencapai keberhasilan dalam pencapaian kinerja Tahun 2024 yakni adanya kendala-kendala dan kekurangan, sehingga perlu adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dalam hal ini Bupati Seram Bagian Timur dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur serta seluruh aparatur di lingkungan Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memfokuskan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 serta rencana kerja tahunan (RKT) tahun 2024.

B. Upaya Lebih Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang aparatur, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur akan terus meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban dalam bentuk:

1. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.



2. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing-masing unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan Pemerintah yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuh-kembangkan masyarakat yang mandiri dan demokratis, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai motivator dan fasilitator.
4. Penguatan daya tahan masyarakat terhadap pengaruh perubahan kondisi nasional dan regional dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala upaya bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



RENCANA STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2021 s/d 2026

- Instansi** : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
- Visi** : Terwujudnya Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Sumberdaya Lokal
- Misi** :
1. Menjalankan Agenda Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Birokrasi;
 2. Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Mendorong Peningkatan SDM yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif dan Berdaya Saing;
 4. Mendorong Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Fiskal Daerah;
 5. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Dan Konektifitas Antar Wilayah; dan
 6. Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat

Tujuan		Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
		Uraian	Indikator			
MISI I : Menjalankan Agenda Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Birokrasi						
1	Terwujudnya Aparatur (ASN) yang berintegritas dan berkarakter	- Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional.	- Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	- Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas keuangan, dan kinerja pemerintah daerah	-	
				- Meningkatkan inovasi birokrasi		
				- Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan apratur pengawasan internasl pemerintahan		
				- Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah		
				- Meningkatkan koordinasi administrasi dan kerjasama pemeritahan		
				- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		

Tujuan	Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan	
	Uraian	Indikator				
2	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur (ASN)	Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik.	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	- Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas keuangan, dan kinerja pemerintah daerah	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Tranpransi, Akuntabel, Partisipatif	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	- Meningkatkan inovasi birokrasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				- Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan apratur pengawasan internasl pemerintahan	Program Administrasi Umum	
				- Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah		
				- Meningkatkan koordinasi administrasi dan kerjasama pemeritahan		
				- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
3	Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Yang Bersih dari KKN.	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Intergritas Pelayana Publik	- IPK dan IRB	- Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas keuangan, dan kinerja pemerintah daerah	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
				- Meningkatkan inovasi birokrasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
				- Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan apratur pengawasan internasl pemerintahan	Program Administrasi Umum	
				- Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah		
				- Meningkatkan koordinasi administrasi dan kerjasama pemeritahan		

Tujuan	Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
	Uraian	Indikator			
			- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan		
MISI 2 : Mendorong Penguatan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat					
4 Pengembangan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dan produktif mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Peningkatan promosi, pengembangan kerjasama daerah dan investasi serta pengembangan produk unggulan daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan sentra ekonomi desa dan penguatan kawasan ekonomi perdesaan		Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Penguatan kinerja ekonomi daerah dan kapasitas fiskal (keuangan) daerah secara berkelanjutan;	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5 Pengembangan Sektor dan Potensi Unggulan Daerah	Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Pengembangan usaha dan industri pengolahan berbasis atau berskala rumah tangga	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Peningkatan produksi, konsumsi dan distribusi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Stabilisasi harga pangan, peningkatan cadangan dan ketahanan pangan daerah, diversifikasi pangan lokal peningkatan industri pangan olahan serta penyediaan lahan pangan berkelanjutan;	Program Pengawasan Keamanan Pangan	

Tujuan	Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
	Uraian	Indikator			
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, peternakan dan perkebunan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Akses pasar, permodalan dan jaringan kemitraan usaha serta pengawasan.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
	Meningkatkan ketahanan ekonomi	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

Tujuan		Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
		Uraian	Indikator			
		Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Wirausahaan		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
MISI 3 : Mendorong Peningkatan SDM yang Berbudaya, Religius, Nasionalis, Kompetitif dan Berdaya Saing;						
6	Meningkatkan Karakter Kehidupan Masyarakat Dan Nilai	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Masyarakat.	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan dan Perbaikan Layanan Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Nilai Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Masyarakat.	Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kawasan sejarah/budaya yang ada di daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	
		Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan kelompok seni budaya tradisonal daerah	Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
7	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	- Indeks Pembangunan Manusia	Penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai nilai kebangsaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Meningkatan kualtiias anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Manusia	Penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even even dan/atau festival daerah	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
		Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas	- Indeks Pembangunan Manusia	Percepatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular, pembudayaan perilaku hidup sehat	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	

Tujuan		Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
		Uraian	Indikator			
8	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningkatn disiplin dan penegakan protocol kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Penguatan sistem kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Program peningkatan disipin dan penegakan kesehatan Covid-19	
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
MISI 4 :Mendorong Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Fiskal Daerah						
9	Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Memperkuat kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Mengembangkan dunia usaha dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Peningkatan layanan dan tata kelola perizinan	Program Promosi Penanaman Modal	
				Peningkatan mutu layanan kemudahan berinvestasi dan kemudahan berusaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk kepentingan investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

Tujuan	Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
	Uraian	Indikator			
			Meningkatkan keamana dan ketertiban masyarakat melalui instrumen dan kelembagaan berbasis partisipatif dan kerarifan lokal	Program Pengelolaan Data dan System Informasi Penanaman Modal	
	Menguatkan perencanaan industir daerah	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Memperkuat kerjasama antar daerah dan membangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan tinggi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	

Tujuan	Sasaran			Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
	Uraian		Indikator			
10	Penguatan dan peningkatan pendapatan daerah	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	

Tujuan		Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
		Uraian	Indikator			
11	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	- Indeks Demokrasi (ID)			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			- Indeks Rasa Aman (IRA)		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
12	Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan	Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi		Program Pelatihan Kerja dan Produktifas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Wirausahaan		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			- Indeks Inovasi Daerah (IID)		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA DAN LITBANG
			- Indeks Inovasi Daerah (IID)		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
MISI 5 : Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat						
13	Meningkatkan sarana dan prasana wilayah	Mewujudkan konektifitas antara wilayah	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Membangun dan merehabilitasi infstruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Tujuan		Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
		Uraian	Indikator			
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan manajemen transportasi daerah	Program Pengembangan Pemukiman	Ruang
		Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Optimaliasi UPT Pengelolaan Terminal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Meningkatkan pengembangan angkutan untuk dan menuju pusat kawasan dan pusat pelayanan ekonomi		
14	Meningkatkan pelayanan transportasi antar pulau dan/atau kepulauan	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah	- Tingkat Aksesibilitas	Meningkatkan kualitas layanan transportasi	Program Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	- Tingkat Aksesibilitas	Meningkatkan layanan dan sarana infrastruktur dasar di daerah terpencil	Program penyedia angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
					Program Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota	
					Program Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
MISI 6 : Mendorong Peningkatan Layanan Sosial Dasar Masyarakat						

Tujuan	Sasaran		Strategi dan Arah Kebijakan	Program	Keterangan
	Uraian	Indikator			
15	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB	- Menggerakan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peningkatan sumber daya manusia - Meningkatkan layanan dan tatakelola pelayanan sosial dasar masyarakat - Meingkatkan partisipasi aktif masyarakat - Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publi	-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Mindset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional	- Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	B	
			Angka	2,51 - 3,25	
2	Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik.	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	
			Angka	2,51 - 3,25	
3	Transparansi, Akuntabel, Partisipatif	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	
			Angka	2,51 - 3,25	
4	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas Pelayanan Publik	- IPK dan IRB	Nilai	B	
			Angka	2,51 - 3,25	
5	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	5,71	
6	Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	33,20	
7	Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	67,5	
8	Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	100	
9	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	
10	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,18	
11	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	- Wirausahaan	Persen	10,1	
12	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Masyarakat.	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8	
13	Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
14	Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat	- Indeks Pembagunan Kebudayaan	Persen	75,8	
15	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	
16	Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	
17	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	
18	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8	
19	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8	
20	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	77,0 - 81,0	
21	Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,26	
22	Menguatkan perencanaan industri daerah	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	
23	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	
24	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	- Indeks Demokrasi (ID)	Angka	100	
		- Indeks Rasa Aman (IRA)	-	-	
25	Membangun SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	55,1	
26	Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Wirausahaan	Persen	10,5	
		- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	55,3	
		- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Skor Indeks	100	
27	Mewujudkan konektifitas antara wilayah	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	
28	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	
29	Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	
30	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
31	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah	- Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1	
			Skor	Tinggi	
32	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	- Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1	
			Skor	Tinggi	
33	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	- IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB	Persen	5,02	
				71,2	
				56,4	
				94,2	
				3,7	
				25	
				7,3	
				65	



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Mindset Apartur Birokrasi (ASN) yang	- Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	Nilai	B	-	
			Angka	2,51 - 3,25	-	
2	Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik.	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B		
			Angka	2,51 - 3,25	-	
3	Transparansi, Akuntabel, Partisipatif	- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	B	-	
			Angka	2,51 - 3,25	-	
4	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas Pelayanan Publik	- IPK dan IRB	Nilai	B	-	
			Angka	2,51 - 3,25	-	
5	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	5,71	33,25	
6	Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	33,20	82,52	
7	Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	67,5	28,04	
8	Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	100	77,24	Dinas Ketahanan Pangan
9	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	- Pertumbuhan PDRB dan Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	3,91 - 167,2	
10	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,18	-	
11	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	- Wirausahaan	Persen	10,1	20,97	
12	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal Masyarakat.	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8	59,38	DISPENBUDPO RA
13	Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8	59,38	DISPENBUDPO RA
14	Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	75,8	59,38	DISPENBUDPO RA
15	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi	DISPENBUDPO RA
16	Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	Tinggi	Tinggi	DISPENBUDPO RA
17	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas	- Indeks Pembangunan Manusia	Skor	65,05	69,84	DISPENBUDPO RA
18	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8	49,12	DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
19	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan	- Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	75,8	49,12	DINAS KESEHATAN
20	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	77,0 - 81,0	82,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
21	Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	- Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	Persen	50,26	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN
22	Menguatkan perencanaan industr daerah	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	3,91 - 167,2	DINAS KOPERINDAG
23	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	- Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	Persen	1,98 - 154,86	3,91 - 167,2	DINAS KOPERINDAG
24	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	- Indeks Demokrasi (ID)	Angka	100	-	BADAN KESBANGPOL
		- Indeks Rasa Aman (IRA)	-	-	-	SATPOL PP
25	Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan	- Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	Persen	55,1	28,04	DINAS NAKERTRANS
26	Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Wirausahaan	Persen	10,5	20,97	DINAS KOPERINDAG
		- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	55,3		DISPENBUDPO RA
		- Indeks Inovasi Daerah (IID)	Skor Indeks	100	33,23	BAPPEDA
27	Mewujudkan konektifitas antara wilayah	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	66,67	DINAS PU
28	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai	- Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	Persen	38,7	66,67	DINAS PU
31	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah	- Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1	5,91	DINAS PERHUBUNGAN
			Skor	Tinggi	kurang	
32	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	- Tingkat Aksesibilitas	Persen	55,1	5,91	DINAS PERHUBUNGAN
			Skor	Tinggi	kurang	
33	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	- IPKM, AHH, IKM, AHH, Gini Rasio, IDD, IKLH, IRB, PDRB, IRA, ID, IPK, SPPH dan IRB	Persen	5,02	-	
				71,2	-	
				56,4	-	
				94,2	-	
				3,7	-	
				25	-	
				7,3	-	
				65	-	



REALISASI PROGRAM PENDUKUNG SASARAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
1	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Mindset Aparatur Birokrasi (ASN) Yang Profesional	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.107.800	640.107.800	Inspektorat
			Terwujudnya Barang Milik Daerah	150.551.875	150.551.875	
			Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	35.280.000	35.280.000	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.699.581.000	2.699.581.000	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	352.200.000	352.200.000	
			Terwujudnya Pendampingan & Asistensi	150.640.000	150.640.000	
2	Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Penataan Organisasi	927.880.827	927.880.827	Bagian Organisasi-Setda
3	Transparansi, Akuntabel, Partisipatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Penataan Organisasi	927.880.827	927.880.827	Bagian Organisasi-Setda
4	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Penataan Organisasi	927.880.827	927.880.827	Bagian Organisasi-Setda
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.107.800	640.107.800	Inspektorat
			Terwujudnya Barang Milik Daerah	150.551.875	150.551.875	
			Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
			Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	35.280.000	35.280.000	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.699.581.000	2.699.581.000	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	352.200.000	352.200.000	
5	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Pendampingan & Asistensi	150.640.000	150.640.000	BAPPEDA
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.724.596.230	1.655.572.413	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.999.951.000	25,029,000	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	318.870.618	308.357.588	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	199.057.240	190.257.240	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	102.060.340	102.060.340	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.000.965	45.412.281	
6	Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah Secara Berkelanjutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati Lainnya	150.000.000	67.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengolahan Persampahan	Pengelolaan Sampah	1.150.000.000	460.000.000	
7	Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Subsektor	Program Penempatan Tenaga kerja	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	50.012.980	50.012.980	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan	Keterpenuhan Akses Masyarakat Terhadap Komiditi Unggulan Daerah Dan Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.235.099.100	1.234.585.400	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tercapainya Penanganan Kerawanan Pangan	200.000.000	199.994.000	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya Pengawasan Keamanan Pangan	121.250.800	121.250.800	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
9	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjamkoperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	30.000.000	30.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.779.450.700	1.769.448.000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerja	16.630.000	16.611.488	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	374.100.000	371.311.395	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	983.737.301	966.084.500	
10	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Program Promosi Penanaman Modal	-	50.500.000	50.500.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	-	257.750.000	257.000.000	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	84.181.500	84.076.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	935.569.160	929.844.000	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	1.174.994.050	1.170.793.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM, dan Karang taruna)lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	24.999.290	22.957.100	
			Fasilitas pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	100.000.000	99.953.000	
			Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1.049.994.760	1.047.883.000	
		Program Penataan Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	450.000.000	450.000.000	
11	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.779.450.700	1.769.448.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
12	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab/Kota	1.281.092.500	1.205.510.250	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
13	Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	-	-	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab/Kota	1.281.092.500	1.205.510.250	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
14	Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	-	-	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab/Kota	1.281.092.500	1.205.510.250	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
15	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.506.090	26.506.090	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	326.493.000	305.275.850	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	245.685.250	232.862.150	
16	Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
17	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	26.506.090 326.493.000 245.685.250	26.506.090 305.275.850 232.862.150	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
18	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pmenian Upaya Kesehatan Perorongan dan Upaya Kesehatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makan Minum	- - - -	69.596.749.617 66.911.293.265 320.000.000 273.524.960	69.596.749.617 66.911.293.265 320.000.000 273.524.960	Dinas Kesehatan
19	Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial Dan Jaminan Kesehatan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pmenian Upaya Kesehatan Perorongan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makan Minum	- - - -	69.596.749.617 66.911.293.265 320.000.000 273.524.960	69.596.749.617 66.911.293.265 320.000.000 273.524.960	Dinas Kesehatan
20	Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah Secara Berkelanjutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengolahan Persampahan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati Lainnya Pengelolaan Sampah	150.000.000 1.150.000.000	67.000.000 460.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
21	Meningkatkan Investasi Dan Penyerapan Tenaga Kerja	Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- - - -	50.500.000 257.750.000 84.181.500 935.569.160	50.500.000 257.000.000 84.076.000 929.844.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
22	Menguatkan Perencanaan Industri Daerah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjamkoperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerja Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	30.000.000 1.779.450.700 16.630.000 374.100.000 983.737.301	30.000.000 1.769.448.000 16.611.488 371.311.395 966.084.500	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
23	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DPAL) Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.307.863.615 385.662.900 1.147.579.900 17.587.500 857.024.000 149.868.800 1.586.414.000 539.815.100 658.694.125 346.193.000 880.695.800	4.175.322.241 380.644.600 1.129.022.389 17.325.500 755.989.718 73.423.000 1.570.103.000 537.289.720 655.551.175 346.088.000 876.903.500	BPPKAD

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	516.840.998	2.427.656.917	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	623.711.900	1.374.732.050	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	30.000.000	30.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.779.450.700	1.769.448.000	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerja	16.630.000	16.611.488	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	374.100.000	371.311.395	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	983.737.301	966.084.500	
25	Membangun SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	Program Penempatan Tenaga kerja	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	50.012.980	50.012.980	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27	Mewujudkan konektivitas antara wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan	67.079.800	49.985.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rekonstruksi Jalan	33.410.720.067	28.817.365.130	
			Rehabilitasi jalan	35.328.805.350	24.799.789.731	
			pemeliharaan rutin jalan	55.000.000	55.000.000	
			Pembangunan jembatan	3.624.492.081	3.393.785.280	
			Rehabilitasi jembatan	577.051.050	431.360.115	
28	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan	67.079.800	49.985.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rekonstruksi Jalan	33.410.720.067	28.817.365.130	
			Rehabilitasi jalan	35.328.805.350	24.799.789.731	
			pemeliharaan rutin jalan	55.000.000	55.000.000	
			Pembangunan jembatan	3.624.492.081	3.393.785.280	
			Rehabilitasi jembatan	577.051.050	431.360.115	
		Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan tanggul sungai	2.359.701.175	1.869.039.025	
			Pembangunan bangunan perkuatan tebing	7.019.800	6.735.800	
			Pembangunan Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya	6.014.410.841	5.149.447.615	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	14.196.072.840	14.196.072.840	
29	Presentase Panjang Jalan Kabupaten Dan Peningkatan Status Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan	67.079.800	49.985.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rekonstruksi Jalan	33.410.720.067	28.817.365.130	
			Rehabilitasi jalan	35.328.805.350	24.799.789.731	
			pemeliharaan rutin jalan	55.000.000	55.000.000	
			Pembangunan jembatan	3.624.492.081	3.393.785.280	
			Rehabilitasi jembatan	577.051.050	431.360.115	
30	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Dan Fasilitas Layanan Dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan	67.079.800	49.985.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rekonstruksi Jalan	33.410.720.067	28.817.365.130	
			Rehabilitasi jalan	35.328.805.350	24.799.789.731	
			pemeliharaan rutin jalan	55.000.000	55.000.000	
			Pembangunan jembatan	3.624.492.081	3.393.785.280	
			Rehabilitasi jembatan	577.051.050	431.360.115	
		Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan SPA di kawasan strategis kabupaten/kota	5.147.198.180	4.605.465.000	
		Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan	Penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	99.995.400	99.995.400	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
31	Peningkatan Pelayanan Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing, Dan Memberikan Nilai Tambah	Program Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C (fasilitas umum dan	419.145.000	417.772.360	Dinas Perhubungan
		Program Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota Dalam Rangka Penurunan Angka Kecelakaan Di Jalan	Pengadaan dan pemasangan terlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan rekayasa lalu lintas	230.000.000	229.937.640	
		Program penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya Angkutan Umum dan Jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5.549.456.761	5.242.306.761	
		Program Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.817.620.205	1.784.139.718	
32	Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung	Program Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C (fasilitas umum dan pendukung)	419.145.000	417.772.360	Dinas Perhubungan
		Program Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota Dalam Rangka Penurunan Angka Kecelakaan Di Jalan	Pengadaan dan pemasangan terlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan rekayasa lalu lintas	230.000.000	229.937.640	
33	Mewujudkan Tujuan Pembangunan Sebagaimana Dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) Serta Revolusi Industri 4.0			4,5		
				70,3		
				55,8		
				93,5		
				3,5		
				20		
				6,7		
				60		